**PERJANJIAN PERKAWINAN PEMISAHAN HARTA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015**



**PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI’AH**

**TESIS**

**Oleh:**

**M SHIDQI NIM 503180016**

**PROGRAM MAGISTER PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH PASCA SARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

i

**ABSTRAK**

Perjanjian perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69 PUU-XIII/2015 ini memiliki tujuan yang mulia. Perjanjian perkawinan ini dibuat sebagai upaya anstisipatif ketika di kemudian hari mengalami hal-hal yang tidak diinginkan berupa konflik keluarga yang berdampak pada sengketa harta. Dengan ini penulis terdorong untuk mengkaji perjanjian perkawinan pemisahan harta menurut *maqasid al syariah*, dewasa ini permasalahan yang muncul adalah karena menurut hukum Islam pasti ada pro dan kontra, sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif tentang bagaimana *Maqasid Al Syari‟ah* memandang konsep perjanjian perkawinan pemisahan harta. Berangkat dari problematika tersebut Penulis mengambil rumusan masalah: 1. Bagaimana analisis *Maqasid al syari‟ah* terhadap argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?, 2. Bagaimanakah analisis maqasid al syari‘ah terhadap implikasi perjanjian perkawinan pemisahan harta harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan Dalam perspektif *hifdz an-nafs* ( menjaga jiwa ) masuk dalam kategori peringkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*). Pemeliharaan akal (*al-aql*) dalam regulasi perjanjian perkawinan diaktualisasikan melalui penyediaan regulasi dan aturan, tahapan pembuatan perjanjian perkawinan, lembaga yang memiliki kuasa untuk membuat perjanjian perkawinan.



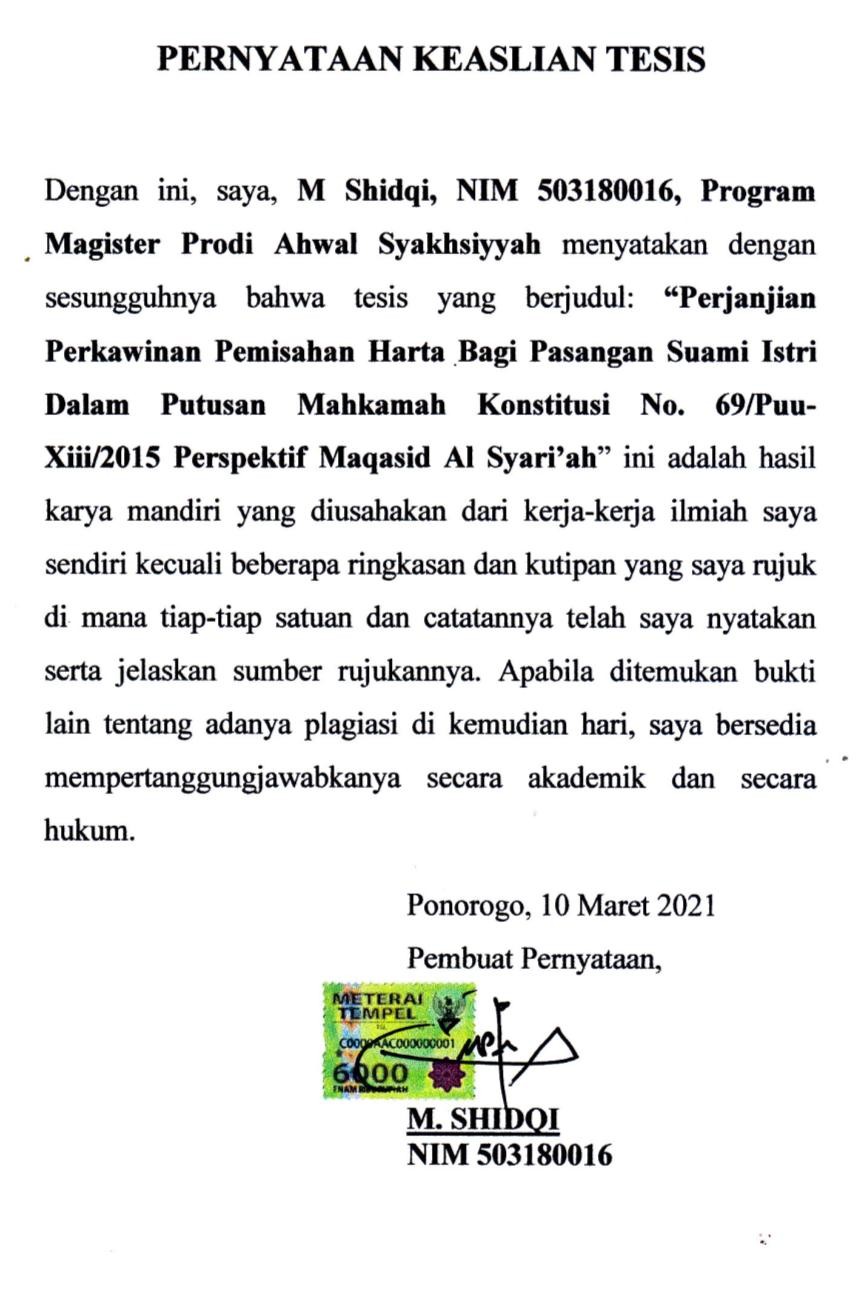
ii

**ABSTRACT**

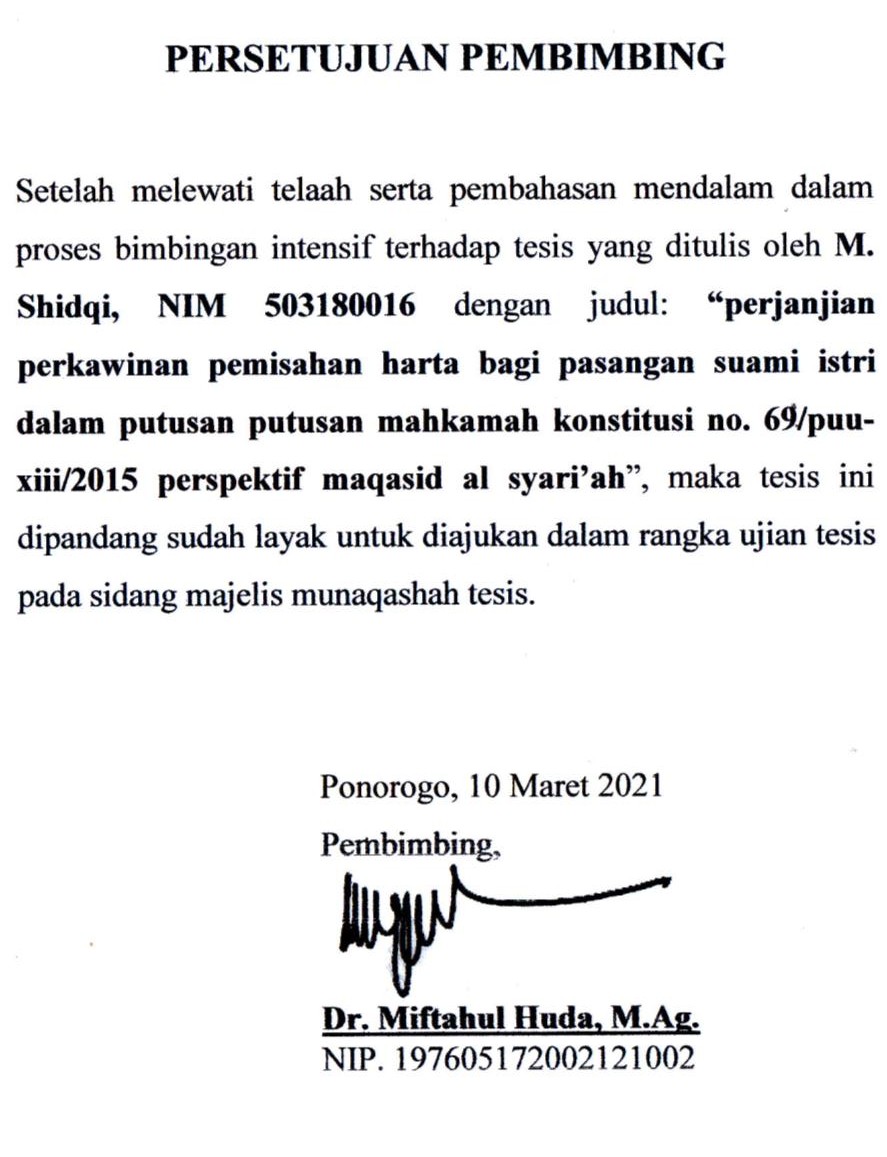
The marriage agreement after the decision of the Constitutional Court (MK) Number 69 PUU-XIII / 2015 has a noble purpose. This marriage agreement is made as an anticipatory effort when in the future there are things that are not desired in the form of family conflicts that have an impact on property disputes. With this the author is encouraged to study the marriage agreement for the separation of assets according to maqasid al sharia, nowadays the problem that arises is because according to Islamic law there must be pros and cons, so it is necessary to do a comprehensive study of how Maqasid Al Syari'ah views the concept of a marriage agreement of separation of assets. Departing from these problems, the authors take the formulation of the problem: 1. How is the Maqasid al syari'ah analysis of the legal arguments for the separation of husband and wife's assets after the decision of the constitutional court no. 69 / PUU-XIII / 2015 ?, 2. How is the analysis of maqasid al syari'ah on the implications of the marriage agreement for the separation of husband and wife's assets after the decision of the constitutional court no. 69 / PUU-XIII / 2015 ?. This research uses the normative juridical method or literature law research because it is carried out by examining library materials or secondary data, namely research on legal principles by identifying in advance the legal principles that have been formulated in the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU- XIII / 2015. In this study, the authors conclude that in the perspective of hifdz an-nafs (keeping the soul) it falls into the category of secondary needs (al-hajiyyah). The maintenance of reason (al-aql) in the regulation of the marriage agreement is actualized through the provision of regulations and rules, the stages of making a marriage agreement, the institution that has the power to make a marriage agreement.



iii



iv



v

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO



PASCASARJANA

Tuaktt4itasi B ..,,...; SK BAN-PTN••~r: 1'199/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PTIOIS

AJa.. 1: A p,...•b 15' P- ... U471 Telp.(OJ524) 81277Fu. (OJ524) 618'3

**•••••••• Website: "tt"---ww.g •w1.i1ing no30,1t.id Email: g 1Sf.a • 'ainpnorro·•f.id**

KEPUTUSAN DEW AN PEN GU.TI

Tesis yang ditulis M.Sbidqi, Nim 503180016, Program Magister Prodi Abwal Syakbsiyyab dengan juduJ : "perjanjian perkawinan pemisaban barta bagi pasangan suami istri dalam putusan putusan mabkamab konstitusi no. 69/puu-xiii/2015 perspektif maqasid al syari'ab" telah dilaksanakan ujian tesis dalam sidang majelis *Munaqasah* tesis Pascasarjana lnstitut Agama lslam Negeri pada Bari Jum'at, tanggal 16 April 2021 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

Nama Pen ii r. Nur Kolis, M.Ag

IP 197106231998031002

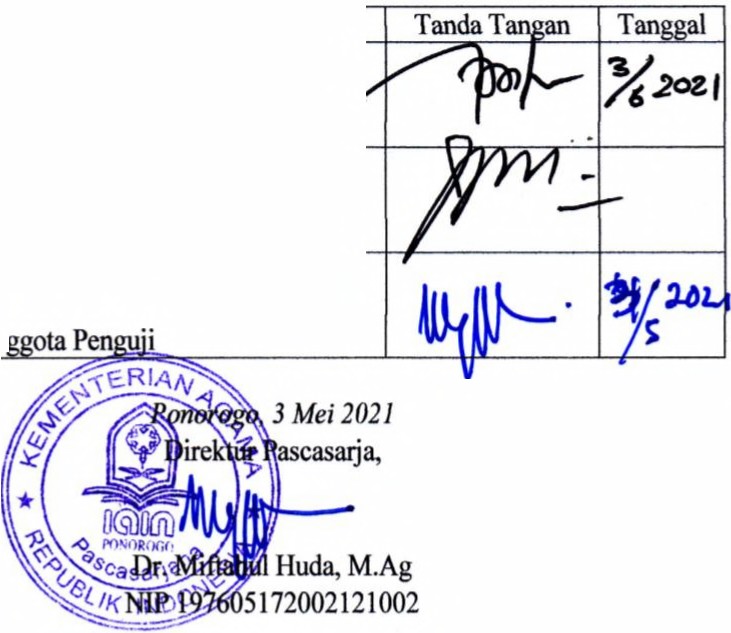
etua Sidan

. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag

IP 197207142000031005 en ii Utama

r. MiftahuJ Huda, M.Ag IP 197605172002121002 n

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No |  | |
| I. | D N K | |
| 2. | Dr  N P | |
| 3. | D  N  A |  |



vi

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama M. Sidqi

~ 503180016

Prodi

Judul Tesis

Ahwal Syakhsiyyah

Perjanjian Perkawinan Pemisahan Barta bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XID/2015 PenpektifMaqasid AI-Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya · saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pemyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Mei 2021

PenuJis,

*c·¥*

M.~Sidqi

NIM 503180016



vii

**BAB I PENDAHULUAN**



**A. Latar Belakang**

Perjanjian pernikahan memang belum umum dan dikenal luas di masyarakat, bahkan masih dipandang negatif sebagai sesuatu yang tabu, tidak etis dan pamali serta dianggap tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan sebelum terjadinya pernikahan masih dianggab sebagai pantangan untuk dilakukan dan bisa menjadi sandungan yang memicu ketegangan tidak hanya diantara calon pasangan pengantin saja namun bisa merembet kepada kedua keluarga besar diantara kedua besan, ketika ide perjanjian perkawinan itu dimunculkan. Selain itu, perkawinan yang dipandang sebagai peristiwa sakral dalam membenuk ikatan keluarga bahagia yang berorientasi jangka panjang, menjadi sesuatu yang riskan dan ironis karena belum apa-apa sudah membuat perjanjian perkawinan yang seolah-olah menkonfirmasi jika perjalanan kehidupan rumah tangganya nanti akan mengalami permasalahan dan tak bertahan lama.

Dengan demikian, pasangan calon pengantin cenderung banyak menghindari membuat perjanjian perkawinan sebelum

dan sesaat berlangsungnya pernikahan. Tetapi seiring

1

perkembangan zaman dan semakin terbukanya pemikiran masyarakat, ditambah persoalan konfilk rumah tangga yang semakin kompleks, angka perceraian yang sangat tinggi, maka perjanjian perkawinan dapat menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan.



Perikatan pernikahan tercantum dalam pasal 29 UU Perkawinan Tahun 1974.1 Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum ikrar diucapkan, berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, dan harus disahkan oleh notaris maupun pejabat pencatatan sipil. Artinya, tidak ada perjanjian yang dilakukan dalam

perkawinan, dan dapat dirubah dengan adanya kesepakatan yang sudah disetujui dari kedua belah pihak.

Peraturan tersebut tidak berlaku semenjak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 69/PUU- XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016. Pada pokok

putusannya mengabulkan permohonan uji materi terhadap

1 A. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. B. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. C. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan dari Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Putusan MKRI tersebut berdasarkan peristiwa pasangan suami istri dengan dasar yang ditentukan baru merasakan akan ada keperluan untuk menyusun perikatan pernikahan sepanjang dalam ikatan pernikahan. Putusan tersebut telah merevisi ketentuan-ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian



perkawinan2, pengakhirannya3, serta masa berlakunya.4

2 perubahann aturan dari yang sebelumnya perjanjian pernikahan hanya dapat dilakukan sebelum pernikahan berlangsung menjadi sebelum dilakukan atau sepanjang dalam ikatan pernikahan. Baca selengkapnya dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), *Putusan Nomor*

*69/PUU-XIII/2015*, 154, 156

3 Perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan dan lainnya tidak dapat diubah atau dicabut kecuali sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan

sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Namun untuk masa berakhirnya

juga ditentukan secara spesifik, apakah perjanjian otomatis berakhir denganberakhirnya perkawinan, atau justru ada perjanjian perkawinan yang justru baru berlaku semenjak perjanjian diseoakati seperti perjanjian hak asuh anak dsb. Baca selengkapnya dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*, 157.

4 Perubahan masa berlaku dari semenjak perkawinan dilangsungkan , berubah menjadi semenjak perjanjian dilangsungkan, dan disahkan oleh

pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Namun belum ada ketentuan

apakah perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan berlaku surut atau tidak. Baca selengkapnya dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*, 156-157.

Perjanjian pernikahan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69 PUU-XIII/2015 ini memiliki tujuan yang mulia. Perjanjian pernikahan ini dibuat sebagai upaya anstisipatif ketika di kemudian hari mendapati sesuatu yang tidak diharapkan seperti konflik keluarga yang berdampak pada sengketa harta. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang disepakati oleh kedua pasangan suami isteri tersebut dapat dijadikan sebagai pegangan dan perlindungan hukum dalam



menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak.5

Hingga saat ini, perjanjian nikah memiliki arti yang beragam. Dan memecah pendapat masyarakat menjadi 2 (dua) golongan yaitu golongan pro dan kontra. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, sudah mengungkapkan bahwa perikatan pernikahan merupakan perikatan yang dibentuk oleh kedua mempelai pra atau pada ketika dilaksanakannya pernikahan untuk menentukan sebab-

akibatnya pernikahan terhadap harta kekayaan mereka.6 Senada

dengan Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, R.Subekti juga menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu

perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan

5 Haedah Fradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal

Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September (2008), 4.

6 R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan*

*Keluarga* (Bandung: Alumni, 1987 ), 57.

mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.7 Sejalan dengan definisi sebelumnya, Komar Andasasmita mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.8 Secara umum, pada intinya perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Pembentukan perikatan pernikahan mempunyai tujuan yaitu untuk menentukan munculnya akibat pernikahan yang terkait dengan harta kekayaan.9



Hal tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan perjanjian perkawinan dalam konsep KUHPerdata yang pada prinsipnya mengenai harta benda dan kek ayaan, sedangkan ketentuan perjanjian perkawinan yang ada dalam Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 secara eksplisit tidak menyebutkan obyeknya mengenai siapa saja sehingga dapat

disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat mengenai

7 R.Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa,

1994),9.

8 Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan*

*Penjelasannya* (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jabar,

1990), 5.

9 Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press), 87.

berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Adapun ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam menurut penyusun sangat jelas mengenai obyeknya, yaitu berupa *ta'lik talak*, pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian.10 Menyangkut bentuk serta isi dari perjanjian pernikahan tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam umumnya suatu perjanjian, kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya diberikan kepada kedua belah pihak asal tidak



bersinggungan dengan ketentuan umum atau tidak keluar dari undang-undang kesusilaan yang ada.

Pada dasarnya, perjanjian pernikahan bertujuan untuk memelihara kepentingan dan hak masing-masing dari suami, istri, bahkan kepentingan anak juga dapat diatur dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang tabu. Padahal, adanya perjanjian perkawinan itu sangatlah penting terutama bagi keluarga yang rentan mengalami konflik keluarga. Dengan adanya perjanjian perkawinan dapat

memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk

10 Sukardi Jurnal Katulistiwa, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata,Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Journal of Islamic Studies, Volume 6 Nomor 1 (2016), 9.

mengantisipasi kepentingan maupun hak-hak semua pihak jika dikemudian hari terjadi konflik keluarga yang berujung pada sengketa harta kekayaan.



Perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam menghadapi terjadinya konflik-konflik keluarga berorientasi mewujudakan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi semua— pihak sebagaimana menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian, sebagaimana pernah dikemukanan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-

kepentingan tersebut.11 Pada tahapan demikian, perjanjian

pernikahan merupakan usaha untuk memberikan kemanfaatan pada seluruh pihak supaya terciptanya suatu kesejahteraan yang tidak berat sebelah atau menguntungkan salah satu pihaksaja. perjanjian pernikahan juga tidak hanya sebagai upaya untuk menjaga harta kekayaan dari kedua belah atau masing-masing

pihak.

11 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2000), 53.

Ditinjau dari status hukumnya, hukum perjanjian pernikahan itu juga tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya, perjanjian pernikahan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Hubungan suami istri akan lebih aman dengan adanya perjanjian perkawinan. Apabila suatu saat mereka mengalami permasalahan yang mengakibatkan hubungan kekeluargaan mereka ternyata ―retak‖ bahkan berujung pada perceraian, maka mereka mempunyai modal



sesuatu yang dapat dijadikan pegangan serta dasar hukum.12

Pembuatan perjanjian pra nikah sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman, selain itu juga dipengaruhi degradasi mental, hal ini bertujuan untuk menghindari bahwa sebuah pernikahan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu tanpa di dasari keikhlasan dari kedua belah pihak. Misal halnya tingkat sosial, penggabungan bisnis keluarga, memperoleh warisan atau semena-mena karena egoisnya.

Dengan itu penulis termotivasi untuk membahas tentang perjanjian perkawinan pemisahan harta dalam pandangan maqasid al syariah, pada zaman ini maslah yang datang sering disebabkan karena anggapan oleh hukum Islam selalu ada pro

dan kontra, sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif

12 Muchsin*, Perjanjian Perkawinan Dalam Persfektif Hukum Nasional*

(Jakarta:Varia Peradilan, 2008), 273.

tentang yang mana Maqasid Al Syari‘ah menganggap konsep perikatan perkawinan pemisahan harta, apalagi secara *fiqih* memang penjanjian perkawinan ini tidak ada aturan didalamnya.



**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis *Maqasid al syari‟ah* terhadap argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU- XIII/2015?

2. Bagaimanakah analisis maqasid al syari‘ah terhadap implikasi perjanjian perkawinan pemisahan harta harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no.

69/PUU-XIII/2015?

**C. Tujuan Penulisan**

Setelah kajian atas rumusan masalah tersebut terjawab dalam penelitian ini, maka para pembaca diharapkan mampu:

1. Mengetahui pandangan *maqasid al syari‟ah* terhadap argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam

putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU- XIII/2015.

2. Mengetahui analisis *maqasid al syari‟ah* terhadap perjanjian perkawinan pemisahan harta harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU-XIII/2015?



**D. Kegunaan Penelitian**

**1. Manfaat teoretis**

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mendeskripsikan teori *maqasid Al Syari‟ah* dalam menguraikan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum dan langkah preventif dalam menghadapi problematika konflik-konflik keluarga yang melibatkan sengketa harta kekayaan. Peneliti mempunyai harapan besar bahwa teori *maqasid al syari‟ah* yang digunakan dalam penelitian ini mampu memberikan kejelasan hukum atas pentingnya perjanjian-perjanjian perkawinan.

**2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para buruh migran pada khususnya akan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai perlindungan keluarga. Dan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikirian dari peneliti dalam upaya memberikan solusi alternatif dalam ikut berperan menangani adanya

konflik-konflik keluarga. Dengan penyajian informasi ini dapat dijadikan dasar baik bagi para pemegang kebijakan, KUA, dan elemen masyarakat dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya perjanjian perkawinan.



**E. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya kerangka teori peneliti mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian- penyesuain dalam rangka menciptakan relevansi data, sehingga bisa memungkinkan terjadi perubahan konsep sebelumnya yang telah ditetapkan dengan konsep lain yang lebih tepat dan akurat, atau mengenyampingkan pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang dianggab kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan. Beberapa referensi jurnal yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini antara lain.

Penelitian Gunadi yang berjudul *perjanjian perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata dan undang- undang nomor1tahun 1974*. Penelitian ini membahas mengenai regulasi Perjanjian Perkawinan dalam tinjaun UUP Nomor 1

Tahun 1974 dan UU Hukum Perdata. Perjanjian pernikahan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan kedua mempelai dengan tujuan mengatur akibat-akibat pernikahan terkait harta kekayaan. Dalam pengertian tersebut menjelaskan bahwa perjanjian pernikahan mengatur mengenai kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pernikahan, yang mana perjanjian tersebut terkait pengaturan harta kekayaan dan



akibatnya. 13

Undang-undang telah memberikan kemungkinan bagi seseorang yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian perkawinan, asalkan: 1). Kedua mempelai telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan; 2). Mereka dibantu oleh pihak yang memberi izin untuk melangsungkan pernikahan; 3). rencana serta konsep dalam perjanjian harus mendapat persetujuan dari hakim pengadilan apabila pernikahan tersebut atas izin hakim.

Bentuk atau isi dari perjanjian pernikahan tersebut pada umumnya, kepada kedua mempelai diberikan kebebasan yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan undang- undang kesusilaan yang baik serta tidak melanggar ketertiban

umum.

13Gunadi*, Perjanjian Perkawinan Menurutkitab Undang-Undang Hukum Perdatadan Undang-Undang nomor 1Tahun1974*, Journal for Islamic Studies,Vol.1, (2018), 01.

Mengenai tujuan dan manfaat perikatan pernikahan diteliti oleh Haedah Faradz.14 Perikatan pernikahan merupakan sesuatu yang memiliki tujuan serta manfaat baik yaitu sarana dalam melakukan tindakan preventif yang mana apabila muncul kasus perceraian, dengan adanya akte Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat maka dapat memudahkan dalam



pemisahan harta gono-gini. Pada saat menjalani permasalahan perceraian antar mantan pasangan suami istri tidak menimbulkan perselisihan terkait pembagian harta benda. Namun dalam masyarakat memandang bahwa perjanjian pernikahan dipandang masih tabu, sehingga perikatan pernikahan jarang sekali diadakan.

Selain itu, perjanjian perkawinana sebagai perlindungan hukum dilakukan oleh Dyah Ochtorina Susanti Perjanjian pernikahan dianggap dapat digunakan Sebagai bahan dasar Perlindungan Hukum Bagi kedua belah pihak (Perspektif *Maqashid Syari,ah*).15 Hukum positif Indonesia dalam mengatur perjanjian perkawinan hanya yang bersifat

materialistik yang hanya mengatur pada hartanya saja.

14Haedah Fradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal

Dinamika Hukum, Vol.8 (2008), 03.

15Dyah Ochtorina Susanti, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk*

*Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami lstri (Perspektif Maqashid*

*Syari,ah)*. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, No.2,

April 2018,1-30, ISSN 2596-6176 (online)

Mengenai hal tersebut, seharusnya perjanjian perkawinan bukan hanya pada hartanya saja akan tetapi mengatur tentang hal-hal misal dalam konsep keagamaannya atau tentang hal-hal yang bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan bagi kedua mempelai sehingga dapat menjadi faktor timbulnya perceraian. Isi pada perjanjian nikah sebenarnya dapat membuat perjanjian yang lain yang bukan terkait harta pernikahan saja, seperti tentang pernikahan monogami, hak dan kewajiban kedua pasangan suami istri, serta perjanjian- perjanjian yang lain yang diharapkan oleh kedua mempelai. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan manfaat serta melindungi hubungan kedua mempelai serta mengurangi hal- hal yang dapat menyebabkan perceraian.



Tugas penguasa atau pemerintah serta DPR RI, seharusnya membuat kegiatan revisi terhadap isi dari peraturan dalam perikatan nikah, bahwa isi dari perjanjian tidak hanya memuat tentang harta saja, akan tetapi terkait hal- hal yang telah ditegaskan dan dijelaskan yang mana suami istri bisa membuat perikatan pernikahan yang isinya selain perikatan yang menyangkut harta. Dengan pertimbangan dari segi sisi utilities (kemanfatan) dan mengacu *maqashid syari ah*, maka perlu diatur dalam aturan tersendiri serta dari hal-hal yang bersangkutan dengan kepastian hukum yang bertujuan

pada memberikan jaminan dan melindungi bagi pasangan suami

istri.

Selain itu pula, perlu dilakukan inventarisir terhadap beberapa penelitian tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Salah satunya adalah penelitian Eva Dwinopianti dengan judul Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan



Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris.16 Dengan

menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian ini memberitahu bahwa dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 kepada pembuatan akta perjanjian pernikahan sesudah nikah yang telah dibuat dengan akta notaris akan merubah ketentuan hukum. Selama perkawinan berlangsung pengadaan perikatan pernikahan dapat dibuat oleh notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Dalam Putusan MK akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setalah kawin terhadap status harta bersama *inheren* (berkaitan erat) dengan waktu mulai

berlakunya perjanjian tersebut dan mengikat terhadap pihak

16 Eva Dwinopianti*, Implikkasi dan Akkibat Hukuum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris,* Jurnal Lex Renaissance No. 1 VOL. 2 (2017), 16 – 34.

ketiga. Hasil Penelitian Eva Dwinopianti ini penting untuk dijadikan dasar bagi peneliti dalam menyelesaikan permasalahan pembuatan akta perjanjian perkawinan khususnya pada notaris.



**D. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Peneliti ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,1 yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap makna- makna dari hukum yang telah dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Dalam desain karya ilmiah ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif berupaya untuk menyajikan realitas sosial dan perspektif dari segi konsep, perilaku dan persepsi obyek yang diteliti.

**2. Pendekatan Penelitian**

Peneliti dalam menggunakan pendekatan peneliti dalam melakukan penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu, yuridis – normatif – sosiologis.



a. Yuridis merupakan letak dari pendekatan yuridis pada cara dalam memakai pendekatan serta pada prinsip-prinsip, konsep- konsep serta asas-asas hukum yang digunakan sebagai sarana dalam melihat, membahas, serta menganalisis dari problematika pembuatan perikatan sebelum nikah di Indonesia melalui analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berhubungan

dengan tema sentral penelitian.17

b. Pendekatan Normatif merupakan pendekatan yang memandang dari segi problem dalam perikatan sebelum menikah di Indonesia dipandang dari segi legal formal maupun normatifnya. Arti legal formal dapat diartikan sebagai hal yang keterkaitan pada konsep halal haram, boleh atau tidak, dan lainnya. Yang mana yang dimaksud aturannya merupakan terkait ketentuan yang terkandung didalam nash serta

bagaimana Islam mengatur tentangnya. 18

17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*

*Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindu Persada, 2001), 13.

18 Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Raja

Grafindo Persada, 2009), 153.

c. Pendekatan sosiologis merupakan gambaran tentang kondisi masyarakat yang lengkap dari mulai struktur, lapisan, serta berbagai kelas sosial lainnya yang saling berkaitan. Fenomena- fenomena dapat di analisa dengan ilmu dengan cara memunculkan faktor-faktor pendorong terjadinya hubungan tersebut, seperti yang disebut interaksi sosial dan kepercayaan atas keyakinan yang berdasarkan terbentuknya proses perikatan



sebelum menikah di Indonesia.19

**3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,1 yang mengungkapkan peraturan UU No 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan dideskripsikan menurut pandangan *Maqasid Al Syari‟ah* Jaser Auda.

**4. Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a) Sumber data Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang mengikat.1 Berupa hal-hal atas ketentuan perundang-

undangan yang mempunyai keterkaitan dengan objek

19 Abbudin Nata. *Metodologi Studi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2002), 39.

penelitian, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

b) Sumber data Hukum sekunder: bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), jurnal-jurnal hukum perdata dan hukum keluarga, dan kasus hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran1. Buku tersebut antara lain:



1. Metode Maqasid al syariah Jasser Auda diterangkan dalam

buku yang berjudul ― Membumikan Hukum Islam Melalui

Maqasid al syariah ‖

2. Karya Jasser Auda dengan judul ― Al-Maqasid untuk

Pemula‖

c) Sumber data hukum tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder1, yang meliputi kamus hukum, dan *encyclopedia*.

**5. Pengelolaan dan Analisis Sumber Data hukum**

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisa bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta tersier.1

Meliputi isi dan struktur hukum positif dalam UU No 1 Tahun

1974, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau

makna aturan hukum yang dijadikan rujukan menggunakan persepktif *MAQASID AL SYARI‟AH* Jaser Auda. Khususnya dalam menyelesaikan permasalahan perjanjian perkawinan pada masyarakat Indonesia.



**E. Sistematika Pembahasan**

Penulisa dalam menyusun penelitian ini terdiri dari lima bab. Sebagaimana maksud dari penulis antara bab satu dengan selanjutnya saling berkaitan dan ketergantungan secara sistematis. Sehungga dalam pembahasanya runtut dari mulai bab satu hingga bab lima menyambung. Jadi dapat di artikan bahwa untuk memahami penelitian ini maka harus dibaca dari bab awal hingga bab akhir atau bab lima.

Maka dari itu pembuatan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif. Maka dalam pembentukan analisa ini membentuk pola induktif yaitu dari hal yang khusus ke hal yang umum. Dapat dimakna terdapat sebuah pemaparan dalam karya ilmiah ini, penjelasan tentang suatu hal yang dihubungkan pada kenyataan atau kejadian khusus, dan selanjutnya cara menarik kesimpulan dari cara pemaparan teori yang berdasarkan pada kenyataan dan teori yang sudah ada

(umum). Yang mana telah dijelaskan oleh Trianto yaitu penelitian yang bersifat induktif merupakan penelitian yang diawali dari pengelompokan data-data yang selanjutnya diolah dan disimpulkan dengan cara rasional sesuai pada dasar pengetahuan (teori) yang benar.20 Apabila digambarkan keterkaitan antara bab-bab dan sejauh mana cakupan penjelasannya tersebut maka dapat digambarkan sebagai



berikut:

Khusus

Bab 1: Dasar pijakan penelitian

Bab II: Eksplorasi Teori

Bab III: Pemaparan

Temuan data

Bab IV:Pengembangan Gagasan Berbasis Teori

Umum

Bab V: Kesimpulan

Tabel 1.1 Model penelitian Piramida Terbalik

20 Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan*

*Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencan, 2010), 155.

Maksud dari model Penelitian piramida terbalik tersebut digunakan supaya pembaca dapat dengan mudah memahai bacaan dengan cara yang tuntas dan komperhensif maka dapat dilihat pada isi serta maksud tesis secara keseluruhan dan benar. selanjutnya lagi maksud dari model gambar diatas agar mudahnya penulis dalam menulis atau menyusun tulisan ini, maka dari itu dianggap membutuhkan penjelasan model penyusunan tesis dan penjelasan tesis ini sesuai dengan penjabaran berikut:



*Bab pertama* mempunyai isi tentang cakupan penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, pada bab ini dijabarkan mengenai fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori metode penelitian dan ditutup dengan penjabaran sistematika pembahasan. Secara umum penyampaian dalam bab ini mempunyai terkait keinginan agar pembaca dapat menemukan latar belakang penelitian ini, dan juga alasan teoritis yang bersumber dari bacaan yang kredibel dan memahami kenapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Selain itu pula, pada bab pertama ini juga dipaparkan mengenai keadaan peneliti dan posisi tesis ini dalam ranah keilmuwan yang orisinil, tetap berkorelasi dengan penelitian yang sebelumnya, dan memunculkan ciri khas yang menunjukkan bahwa tesis ini

berbeda dengan penelitian yang lainnya. Oleh karena itu, bab ini adalah landasan dari bab-bab selanjutnya, dan penulisan metodologis di bab selanjutnya. Sebagai dasar pengembangan teori, penohokan teori, penolakan atau dukungan atas sebuah teori. Bab pertama inilah yang akan menjadi dasar pengembangan teori pada bab selanjutnya.



*Bab kedua* memuat landasan teori yang meliputi konsep perjanjian perkawinan yang terungkap melalui pemikiran para ahli yang dikaitkan dengan konsep perjanjian yang terkandung dalam peraturan dan perundang-undangan. Bagaimana tujuan dan manfaat adanya perjanjian perkawinan dikaitkan dengan *maqasid al syari‟ah.*

*Bab ketiga* berisi pemaparan konsep harta perkawinan, perjanjian perkawinan dalam putusan MK No 69/PUU- XIII/2015 dan dampaknya terhadap perubahan UU No. 1

Tahun 1974. Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum. Data-data terkait dampak putusan MK terhadap perubahan UU No. 1 Tahun 1974, perubahan regulasi pada lembaga yang mengesahkan dan yang mengeluarkan akta perjanjian perrkawinan.

Bab *keempat* adalah berisis pembahasan mengenai argumentasi hukum dan pandangan Maqasid Al Syari‘ah

terhadap perjanjian menurut peraturan dan perundang- undangan.



Bab *kelima,* berisi tentang penutup di mana di dalamnya dijabarkan mengenai kesimpulan serta saran kemudian dilanjutkan dengan penulisan daftar referensi serta lampiran-lampiran.

25

**BAB II**

**KONSEP PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA GONO GINI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**A. Teori *Maqashid Syari’ah* Jasser Auda**

*Maqashid Al*-*Syariah* adalah kata majemuk *(idlafi)* yang berasal pada suku kata yang disebut dengan *Maqashid* dan *al-Syariah*. Menurut bahasa, Maqashid adalah kata jamak *(plural)* dari kata maqshid. 21

Terdiri dari huruf *qaf*, *shad*, dan *dal*, yang artinya tujuan atau kesengajaan. Sementara kata *al-Syariah* secara bahasa berasal dari kata *syara‟ayasyra‟usyar‟an* yang artinya menyusun syariat atau undang-undang, menjelaskan serta menyatakan.22 Dikatakan *syaralahumsyar‟an* berarti ia telah memberi arah kepada mereka atau mempunyai makna sama yang artinya memberi arah jalan atau pedoman.

Sedangkan syariah secara terminologis beberapa ahli

beropini menurut Asaf A.A Fyezz mengungkapkan istilah

21 Ali Mutakinn, *Teori Maqâshid Al Syarî‟ah berhubungan Dengan*

*Metode Istinbath Hukum*, Vol 19 (2017), 03.

22 Lihat Ghafar Shidiq, *“Teori Maqâshid Al-Syarî‟ah Dalam Hukum*

*Islam*‖, dalam Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 (2009), 120.

25

*canon law of Islam* adalah hakikat syariah yang berarti semua aturan berupa nas-nas dari Allah. Sedangkan Satria Effendi mengungkapkan bahwa syariah adalah *al-mushusha lmuqaddasah* yakni *nash* suci yang tercantum dalam Al-Quran dan al-Hadist al-Mutawatirah, yang belum terpengaruhi dari penjabaran dari manusia, maka wilayah syariah ini mencakup



dalam hal *I‟tiqaddiyah*, *amaliyah*, dan *khuluqiyah*.23

Sedangkan para ulama mutakhirin berpendapat dari hal itu sudah terdapat adanya penyempitan makna syariah. Mahmud Syalthuth menyampaikan penjelasan terkait makna syariah bahwa syariah merupakan ketentuan aturan dan tata norma yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya agar dijadikan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhannya, tentang muamalah, bumi dan semua kehidupan. Sementara menurut Ali Al-Sayyiz mengungkapkan bahwa syariah adalah aturan yang disampaikan Allah kepada hambanya agar hambanya meyakini serta mengamalkannya

demi kebutuhan dunia dan akhirat.24

23 La Jamaa, *“Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâshid Al-*

*Syarî‟ah”* dalam Jurnal Ilmu Syarî‘ah dan Hukum Vol. 45 No. II, (2011),

1255-1256.

24 Ali Mutakin, *Teori Maqâshid Al Syarî‟ah Dan Hubungannya*

*Dengan Metode Istinbath Hukum*, Vol 19 ( 2017), 03.

Dapat memahami arti dari *maqashid al syariah* secara etimologi, sehingga bisa membantu kita memahami maksud serta tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Islam, terkait hal ini *maqashid* al-syariah mengindikasikan sangat berhubungan erat dengan hikmah dan illat. Maqashid al syariah sebagai salah satu cabang ilmu tertentu yang independen, beragam versi yang konkrit dan komprehensif tidak akan bisa ditemui lagi dalam disiplin ilmu ini yang notabene ditemurunkan oleh para ulama klasik. Meskipun demikian nantinya tetap akan menemui titik tolak konsep yang hampir sama.



Oleh sebab itu, secara tidak langsung banyak definisi *maqashid al-syariah* lebih sering diungkapkan oleh para ulama terbaru misal halnya Tahir bin Asyur yang memisahkan *maqashid al-syariah* menjadi dua yakni maqashid *al-syariah al ammah* dan maqashid *al-syariah al khashah*. Yang pertama yang diartikan disini yaitu sebagai hikmah, rahasia dan tujuan diberlakukannya syariah secara general yang mencakup semua aspek syarî‘at dengan terkecuali hanya memfokuskan diri terhadap satu bidang. Bagian kedua diartikan sebagai sepaket dari cara khusus yang diterima oleh al-syâri‘ dengan tujuan mewujudkan kehidupan sejahtera manusia dengan cara memfokuskan kepada satu titik dari beberapa titik bidang

syari‘at yang sudah ada, misal tentang ekonomi, aturan hidup berkeluarga.

Sementara sesuai pendapat ‗Allal al-Fâsi merupakan cara dalam rangka melihat tentang apa tujuan pensyari‘atan di mana menjadi aturan yang dapat menentukan kesejahteraan dan menghindari kemafshadatan yang berisi kebaikan untuk



manusia.25 Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa *maqâsid*

*al-maqâsid al-syarî‟ah* adalah unsur nilai dan tujuan syara' yang diungkapkan secara tidak langsung dalam keseluruhan atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Apa yang ditetapkan oleh syar‘i memandang unsur nilai serta sasaran- sasaran sebagai tujuan dan rahasia syarî‘ah, (Allah dan Nabi Muhammad merupakan sebagai pembuat syari‘at) dalam setiap ketentuan hukum.

Al-Syâthibi mengungkapkan bahwa tanggungan- tanggungan syarî‘ah semula kembali kepada penjagaan tujuan- tujuanya terhadap makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam isi yaitu *dlarûriyyât, hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*. Al- Syâri‘ mempunyai visi berisi setiap pembuatan hukum

bertujuan untuk menciptakan kebaikan umat manusia di dunia

25 H. Hasbi Umar, *“Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini”,* dalam jurnal Innovatio, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-Desember.

dan di akhirat.26 Oleh karena itu dalam perbedaan opini dalam mengartikan *Maqashid al-syarî‟ah* tersebut, para ulama *ushûl al-fiqh* memiliki pendapat yang sama bahwa *maqâshid al- syarî‟ah* merupakan keinginan-keinginan sesungguhnya yang harus terwujud di dalam *syarî‟at*. Penerapan *syarî‟at* di dalam kenyataan hidup di dunia, yang di dalamnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kenyamanan untuk kehidupan di bumi ini, sehingga berpengaruh kepada kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat.



Tujuan dari maqasid syari'ah yaitu sebagai alat untuk menwujudkan kedamaian serta kebaikan umat yang sepenuhnya, hal ini berlandaskan tujuan dari dibuatnya serta ditetapkannya peraturan dalam Islam merupakan sebagai sarana mewujudkan kedamaian makhluk dengan cara memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun beberapa dasar tujuan dibuatnya syara' yang harus dilindungi itu adalah 1) melindungi agama, 2) melindungi jiwa, 3) melindungi akal, 4) melindungi

keturunan dan 5) melindungi harta.27

26 Ali Mutakin, *Teori Maqâshid Al Syarî‟ah Dan Hubungannya*

*Dengan Metode Istinbath Hukum*, Vol 19 (2017), 03.

27 Al-Ghazali, *Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, Al-*

*Mustashfa min „Ilm Al-Ushul*, Juz I, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,

1983), 286-287.

Fiqh modern yang di tawarkan oleh Jasser Auda berdasarkan *Maqâshid Al Syarî‟ah*. Islam merupakan agama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta memberikan jawaban dari permasalahan dalam kehidupan manusia supaya seimbang dan selaras. Konsep ini yang akan diangkat oleh Jasser bagaimana agar kehidupan umat manusia bisa diterapkan sesuai aturan serta memberikan keuntungan bagi umat manusia, tentunya hal ini jasser menggunakan sebuah konsep atau sistem terbaru. Dalam *Maqasid al-Shari‟ah as Philosophy of Law: A syistem Approach* Jasser Auda memaknai *Maqasid* menjadi empat makna, pertama, hukum yang mempunyai hikmah. Kedua, tujuan dari hukum adalah memperoleh akhir yang baik. Ketiga, basis dari hukum adalah kumpulan tujuan ilahiyah dan metode tentang akidah. Keempat, Mashalih. Dalam konsep *Maqasid* yang diberikan oleh Jasser Auda, pokok paling utama adalah nilai dan Prinsip



kemanusian.28

Konsep *Maqashid* lama yang berusaha dikonstruk oleh

Jasser Auda yang mengarah kepada teori *maqashid* yang mempunyai sifat *protection* and *preservation* yang mengacu

28 Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, *Konsep Maqashid Al- Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda*), Jurnal Al-Iqtishadiyyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, ISSN Elektronik:, Volume: I., ISSUE I. (2014), 2442-

2282.

kepada *development* and rights. Konsep yang telah berkembang selama ini adalah teori *maqashid* yang berbentuk hirarkis, utama terjadi pada abad ke-20. Teori yang mengomentari beberapa klasifikasi kebutuhan (*necessity*) atau yang disebut teori modern ini, mempunyai alasan-alasan berikut ini: a) *scope* teori *maqashid* mencangkup semua hukum Islam, b) memiliki sifat individual; c) nilai-nilai bersifat paling universal dan pokok tidak dimasukkan, misal kebebasan dan keadilan (*freedom*); d) tidak mengarah pada sumber original/*script* akan



tetapi dideduksi dari kajian *literature fiqhi*,.29

Para ulama‘ kontemporer menentukan terkait kelas- kelas *Maqāṣid al-Syarīah* mereka memisahkan *maqāṣid* menjadi tiga kelas, yaitu *maqāṣid „āmah* (General maqāṣid/tujuan-tujuan umum), *maqāṣid khāṣṣah* (Specific maqāṣid /tujuan-tujuan khusus) dan *maqāṣid juz`iyah* (*Partial maqāṣid*/ tujuan-tujuan parsial).

Seluruh kondisi *tasyri‟* atau bagian besar *Maqāṣid*

*„āmah* mempunyai arti, nilai-nilai dan arti umum, seperti keleluasaan, keadilan, kesetaraan dan kemudahan. *Maqāṣid khaṣṣah* merupakan kebaikan dan konsep yang memiliki tujuan untuk diwujudkan di dalam kajian khusus dalam *syariah*,

seperti yang memiliki tujuan tidak membahayakan dan

29 *Ibid,* 8.

merendahkan kaum wanita dalam tatanan hidup di keluarga, menghalang-halangi masyarakat untuk melanggar dan efek jera ketika memberikan sebuah ganjaran (hukuman), dalam muamalat memusnahkan gharar (ketidakjelasan), dan lain- lainnya. Sementara *maqāṣid juz`iyah* merupakan tujuan serta nilai yang ingin diwujudkan ketika pentasyri‘an aturan tertentu, misal yang memiliki keinginan kejujuran serta hafalan dengan ketentuan tentang orang yang menyaksikan harus lebih dari satu orang, menghapuskan kesukaran pada hukum, misal diperbolehkannya tidak berpuasa bagi manusia yang tidak



mampu berpuasa dikarenakan sakit, bepergian atau lainnya.30

Dalam segi yang lain, terdapat tiga tingkatan dalam piramida *maqāṣid al-Sharīah*, yaitu *ḍarūriyah, ḥājiyah* dan *taḥsīniyah*. Sementara pengkajian yang dilakukan oleh para ulama‘ klasik, *al-Maqāṣid al-ḍarūriyah* ketika memciptakan *syariah* Islam, lima hal pokok dalam kehidupan yang terangkum kedalam konsep yang bertujuan melindungi, yaitu: melindungi agama (*hifẓ al-dīn*), melindungi jiwa (*hifẓ al-nafs*), melindungi akal (*hifẓ al-„aql*), melindungi keturunan (*hifẓ al- nasl*) dan melindungi harta (*hifẓ al-māl*). Para ulama‘ klasik,

semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan *al-*

30 Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid*, h. 15-17; Jasser Auda, *Maqasid al-*

*Shari‟ah as Philosophy of Islamic Law a Sistem Approach*, (Herndon: IIIT,

2008), 5-17.

*kulliyah al-khamsah* menurutnya konsep itu dianggap sebagai *usūl al-syariah* dan menjadi suatu tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.



*Maqāṣid al-Sharī‟ah* yang disusun oleh ulama klasik memiliki kelas-kelas yang berbentuk piramida, yang diawali dari *maqāṣid „amah* sebagai intinya selanjutnya memiliki cabang-cabang menjadi *maqāṣid khasah* dan terakhir *maqāṣid juz‟iyah*. Selanjutnya selain itu disambung dengan *al- ḍarūriyah, ḥājiyah* selanjutnya *tahsīniyah*. Tujuan ia membentuk sesuai tingkat yang mana yang harus didahulukan ini apabila terdapat perdebatan antara *maqāṣid* satu dengan *maqāṣid* lainnya, maka yang utama yang diprioritaskan, yaitu mensegerakan melindungi agama atas jiwa, akal dan seterusnya.

Meski nampaknya konsep ini sederhana, akan tetapi kenyataannya pengaplikasian dari konsep tersebut kedalam realita kehidupan begitu susah dan rumit. Maka dari itu datanglah gambaran lain oleh para ulama kontemporer seperti Jamaludin ‗Atiyah dan Jasser Auda memiliki pendapat berbeda dengan tatanan terdahulu. Mereka berpendapat *maqāṣid al- Syarī‟ah* tidak bersifat susunan piramid meskipun diatur dalam tingkatanya, bila mana *maqāṣid* terpisah antara atas dengan

bawah, akan tetapi menurutnya ia adalah sebuah lingkaran- lingkaran yang dapat bertemu serta bersinggungan (*dawāir mutadākhilah wa mutaqāṭi‟ah*), yang memiliki hubungan saling berhubungan satu dengan lainnya.31



Dalam bagian lain, kita tidak diperbolehkan memberi

batas konsep *maqāṣid* terkait hal-hal yang sudah ditetapkan para ulama klasik sebagaimana yang dijelaskan atas. Hal ini merupakan efek pada perubahan hukum yang disebabkan oleh perkembangan dan perubahan zaman. Misal perbedaannya apa yang pada zaman dahulu menurutnya tidak bernilai bisa jadi pada zaman ini menjadi barang yang bernilai, seperti dalam berbagai kelompok, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Adapun, sesuatu pada situasi dan tempat lain sangat berharga akan tetapi pada tempat dan kondisi yang lain

menjadi tidak berharga.32

31 Jasser Auda, *Maqāṣid al-Ahkām al-Shar‟iyyah wa „Ilaluhā*, diunduh darihttp: [/www.jasserauda.net/modules/Research\_Articles/pdf/article1A.pdf](http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf) diakses pada 25 Agustus 2019.

32 Dengan ini, menurut Jasser Auda, dalam hal bagaimanapun *maqāṣid* merupakan hasil dari produk penelitian (*istiqrā*‘) para ulama‘ *mujtahid* dari nash-nash Syariah. sedang *istiqrā‟* adalah refleksi dari taṣawwur teoritis yang terdapat dalam jiwa mujtahid. Taṣawwur ini dapat berubah sejalan dengan perkembangan pemikiran, kecerdasan dan perubahan kondisi dan

zaman. Jasser Auda menganalogkan konsep ini dengan alam semesta,

sebagaimana pengetahuan manusia atasnya berkembang dan pemahaman manusia berubah dari zaman ke zaman seiring dengan penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi yang terus berkembang, lihat lebih lanjut, Jasser Auda,

Hal-hal sangat penting dipakai untuk mengkaji hukum Islam adalah *Maqasid al syariah*. Auda mengungkapkan bahwa *maqasid al syariah* sebagai perantara antara problem baru yang terdapat pada zaman ini dengan syariat Islam. Dengan demikian menurut Jasser Auda, syari‘at Islam dapat menyumbangkan solusi terhadap problematika umat di zaman modern ini bukan malah sebaliknya. Menurut Auda, hukum Islam dapat menghasilkan kehidupan di masyarakat produktif dan humanis. Jika pada kenyataannya sekarang terjadi sebaliknya, maka terdapat kesalahan pada pemikiran tentang



syariat Islam.33

Apabila pada era klasik *maqasid al syariah* konsepnya merupakan pencegahan, yang condong bersifat hierarki dan sempit diakibatkan terbatasnya kemaslahatan untuk diri sendiri dan dimunculkan karena keterdesakan. Maka *Maqasid al syariah* pendapat Auda merupakan sebuah konsep universal untuk menjahui dari perselisihan antara makna lafaz dan makna teks. Dalam menafsirkan teks-teks al-quran dan hadist maka

*Maqasid al syariah* menjadi sebuat alat dan landasannya.34

*Fiqh al-Maqāṣid*, h. 18-19; op. cit, Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah,* h. 21-

24.

33 Jasser Auda, *Maqasid Syariah,* Dalil al-Mubtadi‘in London: al-

Ma‘had al-Alami li al-Fikri alIslami, 2008), 7, 32 dan 49.

34 *ibid*

**B. Konsep Maqasid Al-Syari’ah Antara Pemikiran Al- Ghazali Dan Al-Syathibi**

Meskipun di kalangan ulama ushul terdapat perbedaan



istilah antara satu dengan lainnya. Muhammad Abu Zahra misalnya, menyebutnya dengan maqasid al-ahkam. Semenjak Zaky al-Din Sya‘ban dan Abdul Wahab Khalaf, mengistilahkan dengan maqasid al-tasri‘. Najmuddin al-Thufi lebih banyak membahasakannya dengan al-maslahah, sedangkan maqashid al-syari‘ah merupakan istilah yang digunakan oleh Imam Ishaq al-Syathibi dan Abdul Karim Zaidan, namun pada prinsipnya perbedaan istilah itu sebenarnya mengandung pengertian sama. Untuk menghindari kekeliruan dan kesimpangsiuran semakaian istilah, maka dalam tulisan ini akan digunakan istilah maqashid al-syari‘ah semata.

Dilihat dari segi kebahasaan, kata ―*maqasahid al- syari‟ah”* terdiri dari dua penggalan kata, yaitu ―Maqashid‖ dan ―al-syari‘ah‖ yang masing-masing punya makna tersendiri. Kata ‖maqashid‖ merupakan bentuk plural (jama‘) dan kata maqshid‖. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal

―qashada‖, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan berkesengajaan. Sedangkan pengertian ―syari‘ah‘ secara harfiah adalah sumber mata air atau sumber kehidupan. Kata

―syari‘ah‖ (tunggal) jamak ―syara‘i‖ berarti segala yang

diisyaratkan Allah kepada hambanya, di antaranya berupa aturan-aturan hukum. Perkataan ―syari‘ah‖ berarti peraturan, sesuai dengan makna yang dijumpai dalam Alquran surat al- Jatsiyah ayat 18: (kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat (peraturan atau undang-undang) dari urusan (agama) itu). Dengan demikian, secara etimologis *maqasahid al- syari‟ah* berarti tujuan Allah (Pembuatan hukum) penetapkan hukum terhadap hambanya, yang inti dari penerapan Syari‘at itu berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.



Kemudian dalam terminologi syari‘at terdapat di kalangan para ulama yang otoritatif dalam bidang ushul tentang pengertian *maqashid al-syari‟ah*. Dalam kaitan ini, Abu Ishaq al- Syatibi (w. 790H/1388 M) dalam bukunya ―al-Muwafaqat‖ menandaskan‖ bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al- syari‟ah* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia. Begitu pula, menurut

‗Allal al-Fasiy dalam karyanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syari‟ah* adalah tujuan yang dikehendaki syara‘ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan (Allah) pada setiap hukum. Adapun inti dari *Maqashid Al-Syari‟ah* itu sendiri adalah tujuan yang dikehendaki syara‘ adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau

menarik manfaat dan menolak mudharat. Atau dengan kata lain seperti yang ditegaskan al-Syatibi bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, taklif pembenaan hukum) harus mengacu kepada wujudnya tujuan hukum itu. Sebab menurut al-Qardawi di mana ada maslahat, dilaksanakan hukum Allah.



Dengan demikian, lihat secara jelas bahwa betapa eratnya hubungan antara *maqashid al-syari‟ah (*tujuan hukum Islam) dengan kemaslahatan (*maslahat*). Pemaknaan terhadap maslahat para ulama mengungkapkannya dengan definisi yang berbeda-beda. Menurut al-Khawaizmi menyatakan maslahat merupakan pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan dari mahluk (manusia). Sementara menurut al-hufi, *maslahat* secara *urf* merupakan sebab yang membawa kepada maslahat (manfaat), sedangkan dalam hukum Islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syar‘i (Allah) baik dalam bentuk ibadah maupun ma‘amalah.

Sedangkan menurut al-Ghazali, *maslahat* makna asalnya merupakan *maslaha* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang di maksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang

pada intinya terangkum dalam al-mabaadi‘ al-khamsyah yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*) akal (*hifzd –„aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al- maal*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut *mafsadah*.



Dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *Maqashid Al-Syari‟ah* adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan, baik di dunia maupun akhirat. Lebih jauh dimaksud at-Thufi tentang al-maslaha di sini adalah al-muslaha yang sejalan dengan tujuan syara‘. Ia berbeda dengan maslaha mursalah yang dinisbahkan kepada mazhab Maliki. Maslahah dalam pengertian at-Thufi lebih luas dari pada itu. Namun dalam hal ini, at-Thufi tidak membagi menjadi tiga tingkatan menjadi *haruriat*,*hajiat* dan *tahsiniat.* Dan hal lain yang membedakan Thufi dengan ulama lainnya adalah bahwa al-maslaha itu terbatas hanya pada hal

muamalah, bukan ibadah.35

35 Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Al-Syari`Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi*, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5, No. 1, 2018

**C. Perjanjian perkawinan menurut Hukum Positif di**

**Indonesia**



Kata perjanjian sesuai di kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih berupa tulisan maupun lisan, yang mana terjadi kesepakatan diantara masing-masing akan menaati dari hasil yang disetujui yang ada dalam perikatan tersebut.36 Menurut KUHPerdata pasal 1313 perjanjian merupakan suatu kejadian yang mana satu pihak melakukan janji dengan orang lain atau yang mana dua orang atau dua pihak membuat janji mengerjakan atau tidak

melakukan hal-hal tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Subekti, kata ― perikatan ‖ dalam bukunya III KUHP mempunyai makna sangat banyak dari perikatan, yang mana hal tersebut mengatur keterkaitan antara aturan sepenuhnya bukan terdapat dari perikatan atau persetujuan bersama. Yaitu perjanjian yang muncul akibat dari penyimpangan terhadap ketentuan hukum dan perjanjian yang muncul akibat dari

pengerjaan keperluan pihak lain yang pada dasarnya bukan

36 https://kbbi.web.id/perjanjian diakses pada tanggal 23 April 2019 pada pukul 11.00

berlandaskan kepada perikatan. Buku III kebanyakan perjanjian merupakan yang muncul dari suatu perikatan.37

kemudian ditentukan di dalam Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 terkait publikasi dan penginformasian Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), Terkait perikatan pernikahan, yang mana perjanjian pernikahan dalam hal yang menyangkut harta bersama terdapat di dalam Pasal 47



KHI telah menyampaikan bahwa perikatan pernikahan bukan hanya dalam lingkup harta bersama yang diperoleh sepanjang pernikahan, tetapi harta yang dibawa oleh masing-masing pihak. Mengenai hal demikian, Damanhuri menjelaskan bahwa perikatan tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu perjanjian pernikahan terhadap harta bersama, yang mana dibuatnya perjanjian tersebut bertujuan untuk menyatukan atau membagi kekayaan individu yang diperoleh sepanjang pernikahan berjalan, hal ini sama dengan ketentuan yang telah

disepakati kedua belah pihak.38

Para ahli juga menegaskan dalam penjelasan lain tentang pengertian yang lain tentang pernikahan, seperti

pedapat WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum bahasa

37 Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermessa ), 122.

38 Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta*

*Bersama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 2.

Indonesia dalam Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, perjanjian mempunyai arti sebagai suatu kesepakatan (lisan atau tertulis) pembuatnya adalah kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati serta mengikuti apa



yang tertera dalam persetujuan itu.39

Definisi perjanjian yang diungkapkan oleh Wirjono Podjodikoro dan Damanhuri, yaitu harta bersama yang diperoleh secara bersama oleh kedua pihak yang memiliki suatu hubungan hukum, yang mana satu pihak dianggap berjanji atau berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu, sedangkan apabila melanggar maka dapat

dituntut oleh pihak.40

Wirjono Projodikoro dan Damanhuri juga mengatakan pernikahan apabila dikatakan perikatan apabila seorang wanita dan seorang lelaki mempunyai kesepakatan dalam melangsungkan pernikahan satu sama lainnya, yang mana suami istri tersebut saling menyetujui akan menaati atura- aturan hukum yang berjalan menyangkut hak-hak dan

kewajiban masing-masing mempelai selama berlangsungnya

39 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum*

*Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

40 Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta*

*Bersama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 1.

kehidupan keluarga, dan terkait setrata sosial di masyarakat dari anak cucu serta keturunannya.41

Berhubung pengertian perjanjian pernikahan tidak ditentukan dengan cara eksplisit di dalam perundang- undangan, akan tetapi dengan cara implisit ditentukan di beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah hasil komparasi Dyah Ochtorina Susanti dalam Jurnal Studi



dan Penelitian Hukum Ulul Albab:42

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Isi Perjanjian  Kawin | KUHPerdata | UU  Perkawinan | Kompilasi  Hukum Islam |
| Mengatur  tentang Persatuan Harta Kekayaan (Harta Bersama) | Calon suami istri  berhak menyiapkan beberapa penyimpang an dari peraturan undangundang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian tidak menyalahi tata susilaan. (Pasal 139) | Pada waktu  atau sebelum perkawinan dilangsungka n, kedua pihak atas persetujuan bersama  dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat | Perjanjian  perkawinan meliputi percampuran harta pribadi dan  pemisahan harta pencaharian masingmasing sepanjang hal itu tidak berentangan dengan  hukum Islam. |

41 Damanhuri, Segi-Segi Hukum..., 2.

42 Dyah Ochtorina Susanti*, Perjanjian pernikahan Sebagai sarana dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif*

*Maqashid Syari‟ah),* Jurnal Studi dan Pemikiran Hukum Islam Ulul Albab, Vol. 1, No. 2, (2018), 12-13.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | perkawinan...  (Pasal 29) | (Pasal 47 ayat  2) |
| Perikatan  dilaksanakan pra nikah | Karena pengaruh  ancaman pembatalan, setiap perikatan pernikahan harus disusun melalui akta notaris sebelum berlangsungnya perkawinan  (Pasal 47) | Pada waktu  atau sebelum pernikahan dilaksanakan, keduanya atas kesepakatan bersama bisa mementuk perikatan tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan.... (Pasal 29 ayat  1) | Pada waktu  atau pra nikah kedua calon suami istri bisa membuat perikatan tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat  Nikah tentang kedudukan harta dalam perkawinan. (Pasal 47 ayat  1) |
| perikatan  tidak bersebrangan dengan norma kesusilaan, agama | Calon kedua  mempelai mempunyai hak untuk menyediakan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang skitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian tidak menyalahi tata susilaan. (Pasal 139) | Perjanjian  perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. (Pasal 29 ayat  2) | Kedua calon  pasangan suami istri bisa mengadakan perikatan pernikahan dalam bentuk:  1. Taklik talak, dan 2. Perjanji an lain yang tidak bertentangan dengan  hukum Islam. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Pasal 45) |

Tabel 2.1 hasil komparasi Dyah Ochtorina Susanti

Tabel diatas dibuat oleh Dyah Ochtorina Susanti sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015 yang telah merubah waktu perjanjian perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 dari dilakukan sebelum perkawinan menjadi sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan. Namun dari ketiga aturan diatas bisa diambil sebuah garis kesamaan bahwa seluruh aturan perudang- undangan tentang perjanjian pernikahan menentukan terkait kekayaan atau harta benda atau harta yang diperoleh bersama.

KUHPerdata mengaturan seperti dalam Pasal 119



KUHPerdata menjelaskan demi hukum ketika dilangsungkannya perkawinan mulai berlaku pengumpulan secara keseluruhan antara harta kekayaan pasangan suami istri. Sebagaimana pengumpulan yang dibuat sepanjang pernikahan berlansung tidak dapat dirubah atau dihapuskan dengan tidak adanya kesepakatan dari suami maupun istri. Maka dari itu, apabila ingin menyimpangi dari isi tentang penggabungan harta tersebut, maka kedua mempelai perlu menempuh jalan melalui perikatan pernikahan yang mana telah diatur pada Pasal 139

KUHPerdata.

**D. Hukum Perjanjian Perkawinan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi**



Kebanyakan terjadinya perikatan pernikahan di Indonesia ini dibuat karena terselip harta serta kekayaan yang tidak seimbang antara kedua mempelai, maksudnya harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak lain. Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan tersebut yaitu untuk melakukan penyimpangan dari apa yang sudah menjadi penjelasan ketentuan terkait harta kekayaan yang dipersatukan. Mereka bebas dalam menghasilkan ketentuan hukum yang

dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi obyeknya.43

Perjanjian perkawinan masuk dalam regulasi perjanjian perdata. Untuk melihat perjanjian tersebut berlaku atau tidak berlakunya, perjanjiannya harus lengkap syarat rukunya. Terdapat empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

**1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya**

Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai hal-hal pokok dalam

perjanjian atau perikatan, seperti dalam pasal 1320

43 Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta*

*Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 14.

KUHPerdata bahwa karena adanya kekhilafan yang didapatkan melalui pemaksaan atau tipuan maka kata sah tidak berlaku. Kesalahan yang bukan menyebabkan batalnya suatu perikatan yaitu terjadinya kesalahan terkait hakikat benda yang menjadi inti perjanjian. Serta batalnya perjanjian akibat tekanan yang dilakukan oleh orang pembuat perjanjian.



**2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa semua pihak paham dalam mengadakan perjanjian terkecuali dinyatakan di undang-undang bahwa pihak atau orang tersebut tidak cakap. Pihak-pihak tadi dijelaskan di KUHPerdata Pasal

1330 adalah yang pertama, pihak yang membuat perjanjian belum mencapai dewasa, kedua pihak yang akan membuat perjanjian merupakan yang ditaruh dibawah pengampunan, ketiga pihak yang akan membuat perjanjian adalah wanita yang sudah menikah. Akan tetapi bagian ketiga ini telah dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan yang mencantumkan bahwa hak dan kedudukan suami–istri yaitu seimbang.

**3. Suatu hal tertentu**

Pada pasal 1332 dan 1333 KUHPerdata menjelaskan ― cuma benda-benda yang bisa dijualbelikan saja yang bisa dijadikan inti suatu perikatan‖, sementara pasal 1333

KUHPerdata menyatakan isi perikatan pernikahan harus memiliki inti dari benda yang paling sedikit tidak akan menjadi masalah benda yang sedikit asalkan masih dapat dihitung atau di tentukan harganya.



**4. Sesuatu yang diperbolehkan**

Perjanjian mempunyai isi yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak bersebrangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum Pasal 1335 KUHPerdata memberikan ketentuan bahwa ―perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.‖

Syarat pertama dan kedua harus dapat dipenuhi oleh subyek hukum. Adapun yang disebut syarat obyektif adalah syarat ketiga dan keempat karena obyek perjanjian harus dapat memenuhi kedua syarat ini. Batalnya sebuah perjanjian dikarenakan tidak terpenuhinya syarat subyektif, yaitu bila mana ada permintaan untuk pembatalan. Serta syarat obyektif bilamana tidak terpenuhi maka perikatan perkawinan tersebut

batal karena hukum.44 Namun terdapat beberapa pengkhususan

pada perjanjian perkawinan. Adanya putusan MK No. 69/PUU-

44 <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>

diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 12.30 WIB

XIII/2015 berdampak pada perubahan pasal 29 UU No. 1 Th.

1974 menjadi:

a. Ketika pada saat, belum dilangsungkannya atau sepanjang ikatan pernikahan kedua mempelai atas kesepakatan kedua belah pihak bisa membuat permohonan perikatan secara tertulis yang dilegalkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, sesudah berlakunya isi tersebut juga berlaku kepada pihak ketiga selama pihak ketiga terlibat.



b. Perjanjian tersebut tidak bisa dilegalkan misalkan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum, agama dan kesusilaan.

c. Perjanjian tersebut dapat berlaku mulai awal pernikahan dilakukan, kecuali ditentukan waktu memulainya dalam perikatan perkawinan.

d. Sepanjang pernikahan berlangsung, perikatan pernikahan bisa mencangkup harta pernikahan atau perikatan perjanjian lainnya, perjanjian tersebut tidak bisa diganti atau dihapus, kecuali apabila terdapat kesepakatan dari semua pihak pembuat perikatan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak

merugikan pihak ketiga.45

45 Dikutib dari salinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum di mana sebelumnya hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan dimulai, saat ini bisa dilakukan baik sebelum perkawinan maupun selama dalam ikatan perkawinan.



Lutfiana dalam tesis di Dalamsarjana IAIN Ponorogo,

membuat sebagai berikut ini:46

Sebelum Perkawinan dimulai

Menyepakati poin-poin yang akan dijadikan sebagai dasar perjanjian perkawinan kedua belah pihak

Dilakukan dihadapan Dispenduk bagi non-muslim, dan KUA bagi yang muslim

Dispenduk dan KUA mengeluarkan akta perjanjian perkawinan dan melegalisasi

Surat perjanjian perkawinan mengikat kedua belah pihak maupun pihak-pihak yang diikutsertakan dalam perjanjian

Gambar 2.1 Alur pembuatan surat perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015

46 Lutfiana Mayasari, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Dalam Putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015*, Tesis, IAIN Ponorogo

Sebelum perkawinan dimulai ataupun selama dalam ikatan perkawinan

Menghadap ke notaris untuk menyepakati perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Notaris melakukan pengecekan terhadap isi perjanjian, kemudian mengeluarkan akta perjanjian perkawinan

akta dari notaris diajukan ke dispenduk bagi pasangan suami istri non muslim, dan ke KUA untuk pasangan suami istri beragama Islam

Dispenduk maupun KUA melakukan pengecekan terhadap substansi perjanjian. JIka isi perjanjian tidak melanggar norma dan aturan yang ada, dikeluarkanlah form legalisasi perjanjian perkawinan

akta perjanjian dinyatakan legal, dan mengikat kedua belah pihak dan juga pihak ketiga sekaligus.



Gambar 2.2 Alur pembuatan surat perjanjian perkawinan

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 dalam bagan diatas tampak jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi besar pada perubahan sistem regulasi hukum perdata di Indonesia. Mengingat bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, dan mengikat, maka ketentuan ataupun peraturan tentang hal serupa yaitu perjanjian perkawinan, baik yang tertulis dalam Kompilasi Hukum

Islam,47 Hukum Perdata,48 maupun UU No 1 Tahun 197449

tidak berlaku.

47 Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *KompilasiHukum Islam pasal*

47

48 Bab Ketujuh Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 *Kitab Undang-*

*Undang Hukum Perdata*

49 Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitupasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinanini tidak

Sedangkan berlaku surut atau tidaknya perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam ikatan pernikahan ditentukan oleh kedua mempelai. Selanjutnya dianalisis oleh pihak notaris adakah kemungkinan merugikan pihak ketiga maupun kedua belah pihak. Yang selanjutnya setelah disepakati oleh kedua belah pihak, notaris mengeluarkan akta perjanjian perkawinan.



Berkaitan dengan pembuatan akta perjanjian pemisahan harta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015, maka notarislah yang diberi wewenang untuk membuat akta perjanjian perkawinan. Karena bukan sebagai lembaga pemerintahan, maka tidak ada aturan baru yang dikeluarkan sebagai implikasi dari putusan tersebut. Artinya notaris langsung bisa mengimplementasikan putusan tersebut tanpa harus menunggu ada regulasi baru. Pedoman yang digunakan oleh notaris dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini adalah

etika profesi.50

diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu

50 N.G Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Majalah Renvoi No. 10.34.III, (2006), 74.

Dalam pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 muncul klausul yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pada notariat yaitu *“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau* ***notaris****, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*. Merujuk pada teori *das doppelte rech stanilitz* Adolf Merkl, putusan MK tersebut secara otomatis menghapus dan atau merubah ketentuan pasal



29 UU No 1 Tahun 1974.51

Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015 telah tepat. Perjanjian perkawinan diberi kedudukan sebagai akta otentik seperti akta lainnya. Di mana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dibuat di depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan diberi form khusus yang disediakan oleh pihat terkait. Kekuatan dari surat perjanjian tersebut sebatas pada pengaturan perjanjian kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Dengan perubahan aturan

yang dibuat, maka akta perjanjian yang dibuat notaris tersebut

51 Lutfiana, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum....*89.

mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.52



Pihak yang diikat oleh perjanjian hanya mengikat secara personal dan juga tidak mengikat kepada pihak-pihak yang lain yang tidak mau memberikan kesepakatannya. Dalam membuat perjanjian seseorang hanya dapat mewakili atau menjadi dirinya sendiri dan tidak bisa mewakili orang lain untuk membuat perjanjian. Perjanjian hanya dapat berlaku pada

mereka yang membuat perjanjian tersebut.53

**E. Tinjauam Umum mengenai Harta Bersama dalam**

**Perkawinan**

**1. Harta Bersama dalam Hukum Islam**

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh dari jerih payah atau usaha dari kedua mempelai selama berlangsungnya pernikahan. Dalam ilmu tasawuf sesungguhnya manusia tidak mempunyai apa-apa semua yang dimiliki selama didunia hanyalah titipan belaka. Jadi dapat kita tarik sedikit kesimpulan menurut ilmu tasawuf manusia atau suami istri tidak mempunyai apa-apa. Maka tidak akan terjadi perjanjian

pernikahan. Akan tetapi dalam pembahasan ini kita di

52 Lutfiana, 52.

53 [https://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/, d](https://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/)iakses pada 12

Desember 2020.

hadapkan oleh realita yang terjadi di masyarakat. Yang mana banyak suami istri yang bercerai setelahnya terdapat perselisihan mengenai harta bersama. Memang tidak ditentukan di dalam kajian fikih (hukum Islam) klasik tentang konsep harta gono-gini atau harta bersama. Fikih Islam klasik merupakan suatu hasil hukum yang disusun oleh para ulama klasik, pada masa sebelum modern. Para ulama tersebut mengartikan fikih Islam sesuai pandangan kepercayaan mereka bahwa itu sudah sama dengan hal-hal yang disampaikan oleh Rasullullah Muhammad SAW. Sesungguhnya harta gono-gini dapat diartikan suatu cakupan hukum yang masih belum dikaji, atau bisa dibilang sebagai cakupan kajian hukum belum ada yang membahas. karena, harta gono-gini mempunyai hal-hal yang dapat dikembangkan dan urgent untuk dibahas pada zaman modern ini. Fikih Islam klasik mempunyai kajian, isu- isu yang sering dibicarakan merupakan terkait permasalahan pembahasan nafkah dan hukum waris. Hal ini yang sudah menarik perhatian untuk membahas tentang kajian fikih Islam klasik ketika memandang permaslahan harta benda dalam



pernikahan.54

Meskipun demikian, berdasarkan beberapa analisis menyatakan bahwa sesungguhnya permasalahan Harta gono-

54 Zulfiqar Mokodompit*, Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam,* dalam jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015, 169.

gini tetap ada didalam kajian hukum Islam. Dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan pendekatan ijtihad dan qiyas terhadap produk hukum Islam yang sudah ada sebagai sarana perbandingan.55



Dalam pandangan zahri hamid bahwa hukum Islam lebih

mengatur terkait terpisahnya antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri selama yang berkehendak tidak menentukan hal-hal lain (hal-hal yang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Kelonggaran yang diberikan oleh Hukum Islam juga kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan apa yang diinginkan kedua belah pihak, dan akhirnya mereka terikat secara hukum

melalui perjanjian tersebut.56

Hukum Islam memandang terkait konsep yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memiliki dampak memudahkan dalam pemisahan mana yang termasuk harta kekayaan suami dan mana harta kekayaan istri, yang mana harta kekayaan bawaan suami dan mana harta kekayaan bawaan istri sebelum pernikahan, mana harta kekayaan

suami/istri yang didapatkan secara sendiri-sendiri selama

55 Hadikusumo Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Bandung

:Mandar Maju, 2007), 7.

56 Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*(Bina Cipta, 1999), 110.

perkawinan berlangsung, serta yang mana harta gono-gini yang didapat dengan cara bersama selama berlangsungnya sebuah perkawinan. Hal ini sangat berguna dalam hal pemisahan harta tersebut dalam memisahkan antara harta kekayaan suami atau harta kekayaan istri apabila terjadi perceraian dalam



perkawinan yang sudah mereka bangun.57

Ketentuan dalam hukum Islam di atas akan tetap dapat digunakan sampai berakhirnya sebuah pernikahan atau meninggal dunianya dari salah satu dari kedua belah pihak. Terkait harta warisan, pandangan dari hukum Islam bahwa warisan yang telah ditinggalkan oleh suami/istri dibagi sesuai peraturan pembagian dalam hukum pewarisan Islam. Terkait harta warisan yang akan dibagi yaitu hak milik dari masing- masing suami/istri yang sudah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkannya dengan harta kekayaan suami/istri yang masih hidup. Harta milik atau yang diperoleh istri tidak dijadikan satu dengan harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri mempunyai hak untuk memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga mempunyai hak dari bagian harta peninggalan

suaminya.58

57 Zahri Hamid, Ibid, hal.110-111

58 Zahri Hamid, Ibid, hal. 111

Hukum Islam mempunyai pendirian bahwa harta yang didapatkan oleh suami sepanjang perkawinan berlangsung maka beralih jadi hak suami, sementara istri hanya mempunyai hak terhadap nafkah/harta yang telah diberikan oleh suaminya. Akan tetapi, dalam Al Quran dan hadis harta kekayaan yang didapatkan oleh suami sepanjang berlangsungnya pernikahan seutuhnya menjadi hak oleh suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al Quran dan hadis juga tidak menjelaskan secara jelas bahwa harta benda yang didapat suami ketika selama pernikahan, maka dapat diartikan istri juga



mempunyai hak terhadap harta tersebut.59

Moh. Idris Ramulyo membagi pandangan hukum Islam tentang harta gono-gini ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

a. Kelompok yang memandang tidak adanya harta gono-gini dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep syirkah. Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian pula, harta suami tetap menjadi milik suami dan

dikuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, istri

59 Zulfiqar Mokodompit*, Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam,* dalam jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 6 (2015), 170.

tetap dianggap cakap bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apa pun, termasuk dalam hal mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa istri itu dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.



b. kelompok yang menganggap dengan adanya harta gono- gini di dalam hukum Islam. Selain menyetujui aturan yang berlaku dalam UU pernikahan bahwa harta gono-gini itu diakui dan diatur didalam hukum positif, kumpulan ini juga melihat aturan tentang harta gono-gini itu seperti dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta gono-gini yang dimaksud merupakan harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama berlangsungnya hubungan pernikahan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau

usaha salah seorang dari mereka.60

**2. Harta Bersama dalam Hukum Positif di Indonesia**

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut ini :61

a. Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 1 menjelaskan

bahwa sesuai tujuan dengan harta gono-gini ( harta

60 Idris Ramulyo, *Harta Gono Gini Mencari Formula Yang Adil Untuk*

*Perempua*n (Jakarta:Swara Rahima 2006), 29-35

61 Etty Rochaeti*, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,* Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 (2013), 653.

bersama) merupakan : ―Harta benda yang didapat sepanjang masa pernikahan ― maksudnya, harta kekayaan yang didapatkan sebelum terbentuknya suatu pernikahan tidak disebut sebagai harta gono-gini.



b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, dijelaskan bahwa ―Sejak saat berlangsungnya suatu pernikahan, maka sesuai aturan hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara kedua belah pihak yaitu suami istri, selama tentang hal itu tidak diadakan ketentuan - ketentuan lain dalam perjanjian pernikahan. Harta bersama itu, selama pernikahan berlangsung, tidak dapat dihapuskan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri ―

c. Kompilasi Hukum Islam (Inpres no. 1 tahun 1991) pasal 85 dsebutkan bahwa : ―Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri‖ Pasal ini telah mencantumkan adanya harta gono gini dalam sebuah perkawinan. Dengan ungkapan lain Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendukung terhadap apa adanya persatuan harta dalam sebuah perkawinan (gono-gini), meskipun harta sudah menyatu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada sejumlah harta milik masing- masing pasangan, baik suami maupun istri.

d. Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali

dinyatakan bahwa ― pada dasarnya tidak ada percampuran

antara harta suami dan harta istri karena perkawinan― Ayat (1). Pada ayat (2) nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya., demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.



Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut :

a. Harta gono gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan . Berdasakan KHI pasal

91 ayat (1) harta gono gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89. ―Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri‖

b. Harta Bawaan Harta bawaan

adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah ―Tentang harta, Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat (2) mengatur, Harta bawaan masingmasing suami dan istri sertaharta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing

sepanjang parapihak tidak menentukan lain―. Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono gini. Suami / istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing- masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan pasal 36 ayat (2) , dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono gini.



c. Harta Perolehan

adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam

perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat

(2).62



654.

62Etty Rochaeti*, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini),*

**BAB III**

64

**ARGUMENTASI HUKUM PEMISAHAN HARTA SUAMI ISTRI DALAM PUTUSAN PUTUSAN**



**MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015**

**A. Deskripsi Argumentasi Hukum Pemisahan Harta**

**Suami Istri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.**

**69/PUU-XIII/2015**

Maraknya perceraian terjadi di Indonesia menyebabkan banyak terjadinya perselisihan mengenai harta bersama. Yang mana harta tersebut diperoleh selama pernikahan berlangsung. Sistem atau model mencari nafkah atau harta kekayaan dalam masyarakat Indonesia terdapat banyak model. Ada yang mencari harta hanya suaminya saja ada pula hanya istrinya mencari harta sebagai seorang TKW, dan ada juga yang mencari secara bersama-sama. Hal ini apabila tidak ada pemisahan atau pembagian yang sudah disahkan dalam akta tertentu, maka akan menimbulkan banyak konflik. Bukan hanya masalah perceraian yang dihadapi oleh negara ini, akan tetapi masalah yang timbul akibat perselisihan dalam pembagian harta juga. Maka dari itu di Indonesia diadakan

terkait perjanjian pernikahan. Di Indonesia bukan merupakan

63

sesuatu yang terkenal atau dibuat suatu keharusan tentang apa yang disebut perjanjian perkawinan. Meski demikian, akan tetapi ada apresiasi yang harus diberikan kepada pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang *aquo,* tetap mengkondisikan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan perjanjian pernikahan. Di sis yang lain, penganut adat ketimuran sendiri tidak sepenuhnya mempertimbangkan terkait dalam hal ini. Menurutnya pembuatan perjanjian perkawinan justru dianggap sebagai bentuk yang bersifat matrealisitis. Padahal pada aspek yang lain, pembuatan perjanjian pernikahan merupakan suatu usaha dari pemerintah untuk menampung kebutuhan



masyarakat serta perkembangan hukum di kemudian hari. 63

Perkembangan zaman yang semakin pesat ini juga berpengaruh terhadap perubahan aturan mengenai perjanjian perkawinan. Melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 untuk mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian

perkawinan, pengakhirannya, serta masa berlakunya.

63Syaifullahi Maslul, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu- Xiii/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Dan Asas- Asas Pembentukan Perjanjian*, Jurnal Mahkamah IAIM NU Metro, Vol. 1, No. 2, (2016), 409-424

Perubahan aturan tersebut dikeluarkan berdasarkan argumentasi hukum yang jelas dan tegas.64

Dalam salinan putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-XIII/2015 dijelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Hukum Perdata, di mana mengenai harta perkawinan berlaku penyatuan harta kekayaan yang bersifat milik bersama. Penyatuan atau medeegendom ini berlaku manakala terdapat suatu hubungan hukum antara keduanya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 119 KUHPerdata yang berbunyi:



―Sejak saat dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri‖.

Dengan adanya ikatan pernikahan maka akan terbentuk pembagian harta persatuan, sehingga harta kekayaan yang didapatkan oleh suami sebelum dan selama berlangsungnya pernikahan dengan dasar hukum maka menjadi harta isteri,

demikian pula sebaliknya;

64Argumentasi ini didapat penelitia dari Salinan putusan MK No

69/Puu-Xiii/2015

Apabila seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, seluruh harta kekayaan yang mereka miliki akan menjadi harta kekayaan bersama. Apabila dikaitkan dengan pasal 21 ayat 3 UUPA, penggalan klausula yang berbunyi : ‖orang luar negeri yang setelah ditetapkannya Undang-undang ini mendapatkan hak milik akibat percampuran harta pernikahan‖ menjadi tepat, karena semua harta yang ia miliki oleh warga negara Indonesia sengan dasar hukum akan menjadi harta bersama dengan warga negara



asing;‖

Ketentuan mengenai peraturan harta bersama didalam perdata yang lebih sering dikenal sebagai percampuran buat tersebut, kemudian berubah karena diundangkannya UUPA No

1 Tahun 1974. Di mana dalam aturan tersebut secara spesifik disebutkan mengenai ketentuan harta bersama, dan menjadi hukum nasional perkawinan. Dalam penutup UUPA disebutkan bahwa dengan adanya UUPA, maka ketentuan yang diatur pada aturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;

Perihal harta benda perkawinan, UUPA menetukan sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama



(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

(2) Mengenai harta bawaan masing-mmasing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pengertian ―harta bersama‖ khusunya menyangkut kepemilikan lahan dan tanah inilah yang seringkali menimbulkan problematika. Banyak pihak beranggapan bahwa karena menjadi harta bersama, maka penguasaan dan kepemilikan baik secara fisik maupu secara legal menjadi

―milik bersama‖. Sehingga akibatnya adalah, dalam sebuah perkawinan campuran meskipun kepemilikan lahan ada pada WNI, namun karena menikah dengan WNA sehingga berubah menjadi milik bersama WNA, maka tetap saja kepemilikan

lahan dianggap illegal dan menyalahi aturan UUPA. Yaitu aturan dalam pasal 21 ayat 3 UUPA yang menyatakan bahwa hanya WNI sajalah yang berhak untuk memiliki asset tanah dan bangunan baik berstatus HGB maupun SHM.



Tentunya hal ini akan berdampak pada hilangnya hak konstitusional seorang WNI untuk mempunyai tanah dengan status Hak Milik dan Hak Guna di Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi menyetujui untuk dikeluarkannya hak milik dan hak guna bangunan dari harta bersama oleh WNI yang melakukan perkawinan campuran.

Guna menengahi perdebatan tentang perjanjian perkawinan khususnya dalam perjanjian pemisahan harta, maka perlu dilakukan analisis menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah*. Tujuan ditetapkannya suatu aturan atau yang sering disebut dengan pengertian *maqashid al-syari'ah* adalah suatu konsep penting dalam pembahasan di dalam hukum Islam. Oleh karena itu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para pemegang teori hukum menjadikan maqashid al- syari'ah sebagai aturan yang sangat perlu dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah merupakan sebagai alat untuk menghasilkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan,

atau mengambil kemaslahatan dan menolak madharat. Makna yang seimbang dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena pemberlakuan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.65



Pembahasan mengenai *maqashid al-syari'ah* sangatlah

luas sekali. Untuk analisis pertama, penulis akan menggunakan pendapat Imam al-ghazali dan mengkorelasikan dengan hukum perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Dalam tulisannya Imam al- Ghazali menyatakan, bahwa kebutuhan manusia yang utama mencakup tiga hal penting, yaitu *dharury*, *hajy* dan *tahsiny*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifdz ad-din* ( memelihara agama ), *hifdz annafs* (memelihara jiwa), *hifdz al- aql* ( memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelahara hart), *hifdz*

*al-irdl* (memelihara kehormatan ).66

65 Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, jurnal Sultan Agung Vol XIIV No. 118 Juni – Agustus 2009, 118.

66 Ridwan Jamal, *Maqashid Al-Syari‟ah Dan Relevansinya Dalam*

*Konteks Kekinian*, dalam h[ttps://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-](https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf) [dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf, d](https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf)iakses pada 20 Desember 2020.

**B**. **Argumentasi Hukum Pemisahan Harta Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015 perspektifTeori *Maqashid al-syari'ah* Jasser Auda**



Kajian *Maqasid al-shari'ah* dikembangkan Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul *Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: a Sistem Approach* yang ingin mendobrak paradigma lama tertutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu- isu kontemporer. Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam. Teori dan filsafat sistem muncul pada paruh kedua abad ke 20 M sebagai anti- tesis bagi filsafat modernis maupun postmodernis. Para teoritikus dan filsuf sistem menolak pandangan 'reduksionis' modernis bahwa seluruh pengalaman manusia dapat dianalisis menjadi sebab akibat. Di sisi lain, filsafat sistem juga menolak irasionalitas dan dekonstruksi postmodernis,

yang dianggapnya sebagai 'meta-narasi' postmodernis.67

67 Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*

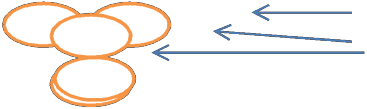
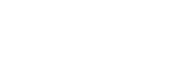
(Bandung: Mizan,2015), hlm. 70.

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy, multi dimentionality* dan *purposefulness*.



Jasser mencoba membagi hierarki *Maqasid* ke dalam 3 kategori, yaitu: Pertama; *Maqasid al-'Ammah* (General Maqasid) adalah *Maqasid* yang mencakup seluruh maslahah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *Dharuriyyat* d*alam Maqasid Klasik. Kedua; Maqasid Khassah (Spesific Maqasid)* yaitu *Maqasid* yang terkait dengan maslahah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun. Ketiga; *Maqasid Juz'iyyah* (*Parcial Maqasid*) yaitu *Maqasid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Maslahah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh *Maqasid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang

bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid. Bangunan *maqasid* tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut:



*Maqasid* Umum *(al Ammah) Maqasid* Parsial *(juz'iyyah) Maqasid* Khusus *(Khassah)*

Ketiga kategori *maqasid asy-syari'ah* tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hirarkis sebagaimana dalam teori *maqasid* klasik. Kesatuan *maqasid* ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan- persoalan konteks

zaman kekinian.68

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan

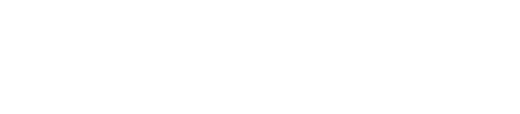
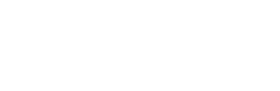
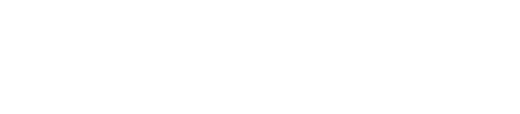
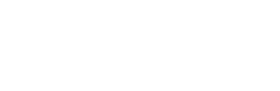
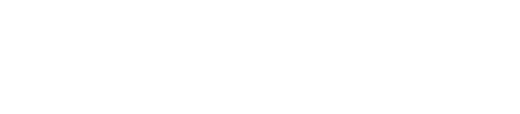
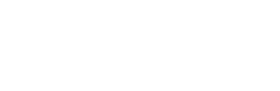
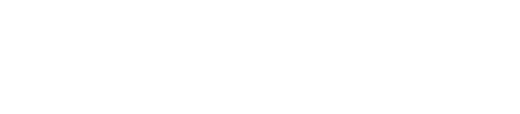
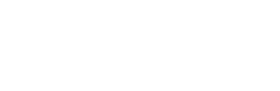
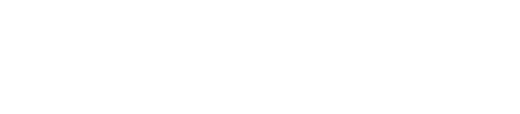
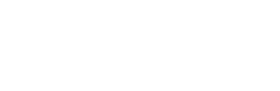
umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan

68 Muhammad Faisol, *Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum*

*Islam : ke arah fiqh Post-Postmodernisme* (Lampung: jurnal Kalam, volume

6, 2012), h 52.

zaman kekinian, maka cakupan dan dimenasi teori *maqasid* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:



Hifdz an-Din Hifdz al-Huriyyah al-I'tiqad

Perlindungan Agama Perlindungan Kebasan berkeyakinan

Hifdz al-Nafs Hifdz al-huquq al-Insan

Perlindungan jiwa Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hifdz al-Mal Perwujudan Solidaritas Sosial

Perlindungan Harta

Hifdz al-Aql Mengembangkan Ilmu

Perlindungan Akal dan Pengetahuan

berfikir ilmiah

Hifdz al-Nasl Hifdz al-usrah Perlindungan Perlindungan Keluarga Keturunan

1. ***Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)**

Agama merupakan sesuatu yang pokok di dunia ini. Karena seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‘an manusia dan jin diciptakan ke dunia hanya untuk menyembah kepada Allah dalam arti manusia dan jin diwajibkan beragama. Selain itu dapat juga disimpulkan kehidupan tanpa adanya agama maka sia-sia. Manusia tanpa agama tidak dianggap jerih payahnya di dunia ini. Tanpa agama juga manusia akan mendapatkan kemadlaratan atau siksaan di akhirat. Maka dari itu para ulama menafsirkan memelihara agama merupakan kebutuhan manusia yang utama yang harus dipenuhi adalah beragama, karena hanya agamalah yang dapat mengendalikan nurani manusia. Sesuai dengan perintah Allah untuk tetap berusaha menegakkan agama dijelaskan dalam al-qur‘an (QS. Al-Syura :



13). Agama memang harus ditegakkan karena agamalah yang merupakan tempatnya akidah, ibadah dan muamalah yang telah disyari‘atkan oleh Allah SWT untuk menentukan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan hubungan manusia antar sesamanya. Perintah syariat dari Allah SWT mewujudkan, mengukuhkan, dan mendirikannya melalui cara mewajibkan manusia untuk melakukan lima rukun Islam yaitu syahadah, mengerjakan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan melakukan haji bagi orang yang mampu.

Kewajiban yang diperintahkan dari Allah SWT yaitu manusia mengajak untuk beragama dengan hikmah dan nasihat yang baik. Perintah dari Allah SWT yang lain juga untuk menjaga agama, dengan demikian terwujudlah suatu konsep jihad demi melawan siapa saja yang akan atau berusaha merusak agama Islam. Begitu juga konsekwensi murtad, penyesatan, dan lain-



lain.69

Memelihara (menjaga) agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :70

a. melindungi (menjaga) agama dalam tingkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah)*, yaitu melindungi dan mengerjakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat kebutuhan primer, misal kewajiban mengerjakan lima rukun Islam yaitu syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu, apabila kewajiban tersebut tidak ditunaikan atau diabaikan maka terancamlah eksistensi agamanya.

b. melindungi (menjaga) agama kepada tingkat kebutuhan

sekunder (*al-hajiyyah*), yaitu melindungi dan melaksanakan

69 Afridawati, *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahah*, jurnal Al-Qishthu Volume 13, Nomor 1 (2015), 21.

70*Ibid, 26.*

ketentuan agama, dengan tujuan menyimpang dari kesulitan, seperti mengerjakan shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang dalam bepergian (musafir), apabila hal ini tidak ditunaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang akan mengerjakannya.



c. melindungi (menjaga) agama kepada tingkat *al- tahsiniyyah*, yaitu mengikuti segala arahan atau petunjuk agama guna menjunjung tinggi harga diri sebagai manusia, serta melengkapi dengan melaksanakan kewajiban- kewajibannya kepada Allah SWT, seperti halnya menutup aurat, baik di dalam shalat maupun di luar shalat, mensucikan badan, pakaian dan tempat, tidak mungkin apabila kewajibannya tidak dikerjakan, maka hal itu tidak akan mengancam eksistensi agama, dan juga tidak mempersulit orang yang melakukannya.

Berdasarkan penjelasan tentang memelihara (menjaga) agama berdasarkan kepentingannya, maka argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 masuk dalam kebutuhan peringkat *al-tahsiniyyah*. Perjanjian pemisahan harta dilakukan sebagai salah satu upaya menjalankan sesuai arahan agama guna menjunjung tinggi harga diri manusia, sekaligus

menyempurnakan dalam pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT. Martabat yang dimaksud adalah dengan menghindari kemungkinan terjadinya konflik dalam suatu perkawinan, jika perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian.



Beberapa akibat hukum yang diakibatkan dari perceraian, salah satunya adalah berkaitan dengan harta kekayaan bersama dalam selama berlangsungnya pernikahan. Adanya harta bersama pada saat terjadinya perkawinan secara berlangsung sedangkan harta bawaan didapat dari sebelum berlangsungnya pernikahan. Namun pada kenyataannya di Indonesia banyak keluarga-keluarga yang tidak mencatat terkait harta bersama yang telah dimilikinya. Pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih jelas pembagiannya pada perkawinan yang masih baru, akan tetapi harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci

satu persatu pada usia perkawinan yang sudah tua.71

Perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian bisa diselesaikan menggunakan sistem

kekeluargaan. Namun jika sistem kekeluargaan tidak dapat

71 Fendra Yuli Hardiyanto, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu* (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor : 062/Pdt.G/2009/PA Rengat), JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 (2015), hal 11.

disepakati maka beralih pada kewenangan dari Pengadilan Agama dan perkara ini bisa diajukan setelah perceraian terjadi dan juga bisa diajukan bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian (akumulasi). Jika suatu perkara hukum sudah sampai pada ranah pengadilan, maka tentunya akan ada implikasi panjang. Yaitu membutuhkan saksi, dan melakukan pembagian harta bersama berdasarkan pengakuan yang tak jarang juga berujung pada konflik.



Dengan adanya perjanjian pemisahan harta, maka harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami akan langsung terbagi seperti harta pribadi dan harta bawaan. Harta bersama ini diperoleh sebagai ―hasil karya‖ dari suami isteri, atau suami atau isteri dalam kaitan dengan perkawinan. Dengan adanya perjanjian pemisahan harta, maka klausul harta suami istri akan otomatis berubah menjadi harta yang dihasilkan suami dan harta yang dihasilkan istri.

Oleh karena itu, argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no.

69/PUU-XIII/2015 dalam perkawinan ini sesuai dengan tujuan memelihara (menjaga) agama di tingkat *al-tahsiniyyah*. Jika perjanjian perkawinan tersebut tidak dilaksanakan karena tidak mungkin, maka tidak akan mempengaruhi terhadap kebaikan

eksistensi agama, dan jika dilakukan tidak mempersungkar orang yang melakukannya. Sebaliknya, justru mempermudah seseorang saat perceraian terpaksa harus terjadi.



Perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan juga bertujuan untuk menghasilkan pola relasi yang baik dalam mengerjakan agama, bagi suami istri. Tidak hanya dalam perceraian saja, namun perjanjian pemisahan harta ini juga mampu menciptakan ketenangan dalam rumah tangga yang harmonis karena dapat menjauhkan dari sikap suudzon antar pasangan. Dengan demikian hak ini digunakan secara tidak langsung untuk menciptakan situasi kondusif dalam rumah tangga untuk mengejewantahkan keberaagamaan seseorang. Sesuai dengan konsep *Hifdz ad-din* (memelihara agama) menjadi *haq attadayyun* (hak Beragama) yaitu hak untuk menjalankan ibadah dan mengerjakan ajaran-ajaran agama.

**2. Memelihara Jiwa (*al-nafs*).**

Selain memelihara agama yang seperti dijelaskan diatas tadi, memelihara jiwa juga sangat diharuskan. Karena agama tanpa adanya jiwa maka tidak dapat melaksanakannya. Meskipun manusia yang tanpa jiwa tidak akan diminta pertanggungjawabannya, karena tidak dianggap hidup. Sementara apabila dibandingkan dengan mempunyai jiwa

tetapi tidak beragama akan mendapatkan siksa di akhirat. Sementara agama tanpa jiwa maka tidak mendapatkan apa-apa. Dengan itu maka para ulama klasik menggolongkan menjaga jiwa menjadi nomor dua setelah menjaga agama. Menjaga (Memelihara) jiwa : diri manusia (nyawa): perintah dari agama Islam berupa mensyari‘atkan supaya mewujudkan serta melestarikan ras manusia dengan jalan perkawinan yang sah menurut hukum Islam serta dapat melanjutkan keturunan yang baik. Hal tersebut bertujuan agar bisa menjaga dan menjamin kehidupan manusia, kewajiban orang yang beragama Islam



secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.72

*Hifdz an-nafs* ( menjaga jiwa ) menjadi *haq al-hayat* ( hak hidup ). Hak ini tidak hanya mempunyai makna sekedar sebagai alat untuk membela diri. Hak ini seyogyanya diarahkan sebagai motivasi untuk menjadikan kualitas kehidupan yang semakin baik khususnya bagi diri dan umumnya bagi masyarakat. Seharusnya adanya hak hidup dapat diorientasikan pada perbaikan mutu kehidupan manusia seutuhnya, bukan

secara parsial.73

72 Afrida, 22.

73 Ridwan Jamal, 9.

Terkait memelihara (menjaga) jiwa sesuai kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :74

a) melindungi (menjaga) jiwa dalam tingkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), yaitu dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup maka manusia diharuskan makan, akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan.



b) melindungi (menjaga) jiwa dalam tingkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), misal dibolehkan berburu serta menikmati makanan-makanan yang halal dan lezat, apabila hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.

c) melindungi (menjaga) jiwa dalam peringkat *al-tahsiniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU- XIII/2015dalam perkawinan berdasarkan kepentingannya

dalam perspektif *hifdz an-nafs* ( menjaga jiwa ) masuk dalam

74Afrida, 26.

kategori peringkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*). Jika perjanjian pemisahan harta tidak dilakukan oleh pasangan suami istri, maka eksistensi manusia tidak akan terganggu. Namun jika tidak dilakukan, maka akan mempersulit suami istri ketika berpisah atau bercerai. Kesulitan akan dirasakan ketika perceraian terjadi dan tidak adanya dasar hukum yang dijadikan acuan kecuali persidangan.



Dengan terbuatnya sebuah perjanjian perkawinan, adanya kesempatan yang terbuka dari suami isteri. Tanpa harus merugikan salah satu pihak mereka juga dapat berbagi rasa sesuai keinginan–keinginan yang telah disepakati. Apabila melihat dari status hukumnya, perjanjian perkawinan itu mempunyai sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya, perjanjian perkawinan itu bersifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja diadakan). Akan tetapi dengan terbuatnya perjanjian pernikahan, hubungan suami isteri akan merasa aman karena apabila suatu saat hubungan kekeluargaan mereka ternyata ‖retak‖ bahkan berakhir pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat

dijadikan pegangan dan dasar hukum.75

75 Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Persfektif Hukum*

*Nasional*, (Jakarta : Varia Peradilan, 2008), 273.

Tanpa adanya perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan maka tidak ada perlindungan hukum terhadap kekayaan dari kedua belah pihak, hal mana UU Perkawinan tidak menentukan terkait tujuan Perjanjian Perkawinan, semuanya diberikan sepenuhnya kepada pasangan suami istri.



Kesulitan lain yang mungkin dialami oleh pasangan suami istri yang tidak melakukan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan adalah masalah hutang piutang. Tentang pemisahan hutang, dalam perjanjian perkawinan dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian. Ketika perceraian terjadi, kedua belah pihak akan membebankan hutang bersama kesalah satu pihak.

**3. Memelihara Akal (*al-aql*).**

Yang menempati urutan ke tiga yaitu menjaga akal. Menurut sebagian ulama menjaga akal di lakukan setelah memelihara agama dan jiwa karena manusia yang memiliki jiwa dan agama akan tetapi tidak berakal maka semua amalnya tidak dianggap atau tidak dipertanggungjawabkan. Sementara apabila manusia berakal akan tetapi tidak mempunyai agama

maka mereka akan mendapatkan siksa. *Hifdz al-aql* (menjaga akal), yaitu *haq al-ta‟lim* (hak mendapatkan pelayanan pendidikan). Dengan tujuan menghargai akal bukan berarti hanya sebatas memelihara kemampuan akal supaya tidak gila ataupun mabuk. Maksud dari penjagaan akal merupakan terpenuhinya hak intelektual bagi masing-masing individu yang berada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini merupakan adanya kejadian pencurian terhadap karya, hak cipta dan kreasi seseorang. Hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan terhadap akal, seperti jaminan keamanan untuk karya-karya



intelektual.76

Terkait pemberian Allah swt tentang perlindungan akal untuk manusia, diwajibkan menuntut ilmu sebagai cara berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya.77 Pemberian layanan pendidikan dan insentif lain yang mengembangkan fungsi merupakan salah satu bentuk peningkatan intelektualitas, efektivitas dan kreativitas pikiran dan juga mencegah dari hal-hal yang dapat

merusaknya serta menghalangi tujuannya yang seharusnya

76 Ridwan Jamal, 9.

77 Syarifuddin,. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2008), 21.

tidak dilakukan seperti minuman keras dan memepercayai takhayul.78

Dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan tentang memelihara (menjaga) akal berdasarkan kepentingannya:79



a) melindungi (menjaga) akal dalam rangka pemenuhan kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), seperti diharamkan meminum minuman keras (*al-khamar*), jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka akibatnya akan terancamnya eksistensi akal.

b) melindungi (menjaga) akal dalam tingkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), seperti anjuran untuk mencari ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya, apabila hal ini tidak dilaksanakan, tidak juga merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam bermasyarakat serta menjalani kehidupan dunia akhirat, dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c) melindungi (menjaga) akal dalam tingkat *al-tahsiniyyah*, seperti halnya menjauhkan diri dari berbuat khayalan

kosong belaka atau mendengarkan sesuatu yang tidak ada

78 Abubakar, A. *Maqasid al-Shari‟ah as Framework for Economic Develompment Theorization*. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, (2016), 1-47.

79Afrida, 27.

gunanya, akan tetapi hal ini berkaitan erat dengan etika, hal ini tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Menurut agama Islam syarat dalam melangsungkan perkawinan atau perjanjian pernikahan, bukan menentukan terkait masalah harta bersama secara tegas, baik Al-Qur‘ān ataupun Al-Ḥadīth, karena yang diintruksikan guna mencari rizki untuk nafkah secara jelas adalah suami, bukan istri, sementara itu istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari sang suami, dan istri bertugas fokus dalam mengatur masalah urusan rumah tangga saja. Sedangkan dalam perjanjian perkawinan ada pemisahan harta antara suami dan istri, artinya pihak istri juga menjadi tulang punggung yang mencari nafkah.



Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat dengan adat ketimuran, menganggap perjanjian sebagai perbuatan yang tidak etis. Menyepakati sesuatu yang berkaitan dengan materi, mencegah konflik, dan bahkan membahas perceraian, padahal maghligai perkawinan belum dijalani. Islam tentunya tidak mengajarkan seperti itu, tidak ada aturan perjanjian pemisahan harta dalam Islam, dan tidak ada membicarakan masalah keuangan sebelum menikah.

Namun masyarakat saat ini semakin berubah. Pernikahan tidak hanya masalah ikatan antara suami dan istri

namun juga mencakup sebuah komitmen keuangan dalam rumah tangga. Tak jarang suami dan istri yang membawa harta bawaan masing-masing, dan setelah pernikahan berlangsung dua-duanya berpenghasilan. perkawinan di Indonesia perlu dimusyawarahkan oleh wali atau kedua orang tua, sehingga dalam pembentukan point-point pada perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, pada akhirnya menyangkut kepada keluarga antara kedua calon tersebut.



Berhubung dengan maraknya praktek-praktek perceraian yang terjadi dimacam-macam pengadilan di Indonesia, akhirnya warga membutuhkan suatu perjanjian dan kesepakatan.

Maka aturan yang diberlakukan di Indonesia baik dalam urusan harta bersama dan perjanjian perkawinan adalah pilihan yang tepat karena sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Pendapat dari Satria Efendi yang dikutip oleh Anshary, mengungkapkan bahwa terdapat dua sudut pandang yang telah ditemukan di masyarakat tentang harta yang diperoleh suami-istri ketika pernikahan berlangsung. Pandapat itu didominasi dan berdasarkan pada

adat kebiasaan setempat, dan tidak didasarkan pada *Syari‟āh*

*Islām*.80

*Pertama*, masyarakat-masyarakat Islam yang telah membagi hak milik suami dan istri. Pada konsep ini tidak didapati harta milik bersama suami dan istri. Harta yang diperoleh suami selama pernikahan merupakan harta suami, tidak dianggap juga sebagai harta bersama (istri ikut memiliki). Dan apabila istri mempunyai penghasilan, maka hartanya akan dipisahkan dengan harta yang diperoleh suami.



*Kedua*, umat Islam yang sudah menggabungkan harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri. Dalam hal ini mereka menganggap akad nikah terselipi dari persetujuan kongsi /shirkah. Maka ketika nikah sudah sah maka harta yang diperoleh, dijadikan sebagai harta milik bersama. tidak saling memperhitungkan banyak yang mana yang memperoleh harta tersebut. Dan juga tidak memeperhitungkan terkait siapa yang banyak mengeluarkan harta untuk mengurus rumah tangga. Apabila harta tersebut terdaftar maka tidak mempersoalkan terkait atas nama siapa harta tersebut. Jika terjadi perceraian,

maka keduanya mendapatkan harta tersebut sesuai pembagian

80 Ru‘fah Abdullah, *Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum*

*Islam Dan Perundang-Undangan*, jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 3 No.

1, (2016), 36.

masing-masing. Begitu juga apabila salah satu dari suami atau istri itu meninggal dunia, maka harta tersebut akan dibagi menurut porsinya, baru setelahnya diselesaikan pembagian harta warisan almarhum dan hal-hal yang terkait dengan harta



warisan tersebut.81

Di Indonesia mempunyai hukum adat yang memiliki gagasan, kesatuan kekayaan tidaklah dari seluruh kekayaan suami-istri, satuan harta hanyalah kekayaan yang diperoleh bersama sepanjang masa pernikahan saja. Adapun terkait kekayaan yang didapatkan oleh masing-masing pihak selama pernikahan dan harta warisan yang ia dapatkan sepanjang

pernikahan, akan tetap menjadi kekayaan milik mereka.82

Melihat fakta dan tradisi yang terjadi di masyarakat Indonesia, maka perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan sesuai dengan tujuan memelihara akal (*al-aql*) dalam *maqashid al-syari'ah.* Karena di dalam regulasi perjanjian perkawinan tersebut terdapat upaya untuk penjagaan terhadap akal, dan jaminan keamanan.

Sebuah perjanjian perkawinan dilakukan secara

prosedural dan dibuktikan dengan sebuah akad yang legal.

81 H.M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 122-123.

82 Ismuha, *Pencarian Harta Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1965), 16.

Dibuat dengan proses yang panjang, diawali dengan pengajuan di notaris, kemudian pengesahan di dispenducapil bagi non muslim, dan pengesahan di KUA bagi yang beragama Islam. Akad yang tertulis di dalampun ditulis sedemikian rupa dan tidak bertentangan dengan etika agama dan sosial yang berlaku di Indonesia.



Peningkatan intelektualitas dan kualitas regulasi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015. Beberapa aturan dihapus dan beberapa aturan ditambah untuk membuat regulasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pemeliharaan akal (*al-aql*) dalam regulasi perjanjian perkawinan diaktualisasikan melalui penyediaan regulasi dan aturan, tahapan pembuatan perjanjian perkawinan, lembaga yang memiliki kuasa untuk membuat perjanjian perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan fungsi, efektivitas dan kreativitas pikiran dan juga mencegah hal-hal yang merusak dan menghalangi fungsi dari perjanjian perkawinan.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah berharap bahwa perjanjian perkawinan bisa memenuhi tujuan dan menjadi solusi dari permasalahan dalam rumah tangga. Jangan sampai adanya aturan perjanjian perkawinan justru menjadi

celah untuk memunculkan permasalahan hukum selanjutnya, dan merugikan pihak lainnya.

**4. *Hifdz al-mal* ( melindungi harta ),**

*Hifdz al-mal* yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak dapat dimaknai sebagai usaha untuk melindungi kekayaan dari ancaman dari pihak lain. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta kekayaan dengan cara yang halal. Apabila diartikan secara luas, hak ini memberikan seseorang tentang wewenang untuk membuka usaha atau lahan bekerja untuk orang lain. Maka dari itu, semua manusia bisa merasakan hak kekayaan yang diperoleh selama kehidupannya untuk memperoleh kualitas

hidup yang sejahtera.83

Memelihara (menjaga) harta kekayaan dengan dasar kepentingannya, hal tersebut dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan: 84



1. Memelihara (melindungi) kekayaan dalam tingkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), seperti yang telah disyari'atkannya melalui tata cara pemilikan harta serta

larangan atau diharamkannya untuk memiliki harta orang

83 Ridwan Jamal, 9.

84 Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, logos

Wacana Ilmu, 1997), 128-131.

lain dengan cara yang tidak halal, jika ketentuan ini tidak ditaati, akan mengakibatkan terancamnya eksistensi harta.

2. melindungi (menjaga) harta dalam tingkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara salam (*bai'u al-salm*) jika cara ini tidak dipakai, tidak akan mengancam eksistensi harta, dan melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.



3. menjaga (melindungi) harta tentang peringkat *al- tahsiniyyah*, misal dalam hal yang ditentukan secara jelas adanya ketika melangsungkan akad diharuskan menyimpang dari hal-hal yang menimbulkan kesalahfahaman antara kedua belah pihak yang melangsungkan akad, hal ini mempunyai kaitan dengan prilaku berhubungan dengan sesama manusia atau etika berbisnis, hal ini juga dapat berpengaruh terhadap kesalahan jual beli itu, apabila hal ini diabaikan, maka tidak juga dapat mengancam eksistensi harta.

Syarifuddin mengungkapkan, manusia untuk bertahan hidup membutuhkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan- kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia membutuhkan harta dan manusia harus tetap berupaya memperoleh harta secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi

pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan yang diperintah oleh syara‘. Allah memerintahkan kepada manusia dalam mencari harta terdapat beberapa firman-Nya, salah satunya yaitu surat Al-jumu‘ah ayat 10.85



Pendapat dari Abubakar, harus melestarikan dan

diperkaya terkait perlindungan harta ini dengan cara membuka jalan pintas yang mempunyai sifat berkesinambungan untuk generasi-generasi selanjutnya, pemanfaatan, penyebaran, dan perkembangan. Ini berguna untuk bahan penting dalam pemenuhan semua dari ke empat keperluan-keperluan lainnya. kesuksesan manusia di dunia ini serta keberhasilannya di masa

yang akan datang adalah berhubungan dengan kekayaan.86

Selama hal tersebut bukan hal yang dilarang oleh hukum Islam, perikatan pernikahan bisa meliputi harta dari mata percaharian pribadi, pembagian harta dari mata pencaharian masing-masing, menentukan masing-masing wewenang untuk membentuk suatu ikatan hipotik (perikatan dengan pihak bank) atas harta pribadi dan harta bersama.

Perikatan tentang pembagian harta kekayaan dalam

pernikahan diperuntukkan sebagai alat untuk mempermudah

85 Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2008), 48.

86 Abubakar, A. *Maqasid al-Shari‟ah as Framework for Economic Develompment Theorization*. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, (2016), 1-47.

dalam membagi harta yang mana merupakan harta bersama, dan mana harta yang bukan milik bersama, supaya apabila terjadi perceraian, pemisahan harta gono-gini bisa di bagi dengan cara yang mudah. Melalui jalan ini, pertikaian antara bekas pasangan suami istri yang bercerai tidak berkepanjangan. perikatan perkawinan tetap penting dan berguna bagi semua wanita, tidak mengacu pada harta, jabatan, atau kekuasaan.



Beberapa manfaat perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan menurut Happy Susanto, antara lain:87

1. Perjanjian perkawinan dibentuk sebagai pelindung menurut hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri). maksudnya perikatan pernikahan bisa berguna sebagai sarana hukum dalam menuntaskan permasalahan dalam rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perpisahan akibat cerai maupun kematian. Dengan adanya perjanjian pernikahan, maka terlihat jelas dibedakan mana yang termasuk harta gono-gini (yang dapat dibagi dua secara merata), dan mana yang termasuk harta pribadi masing-masing (tidak perlu dibagi).

2. Perjanjian pernikahan juga bermanfaat sebagai sarana

dalam mengamankan aset serta kondisi ekonomi keluarga.

87 Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi*

*Perceraian*, Catakan Kedua, (Jakarta: PT. Transmedia Pustaka, 2008), 81.

Jika suatu saat ada penyitaan terhadap semua aset keluarga disebabkan bisnis bangkrut, berhubung adanya perjanjian pernikahan, kebutuhan ekonomi dalam pasangan keluarga akan dapat aman. Pada saat akan membuat perjanjian pernikahan pasangan calon pengantin biasanya melihat bahwa pernikahan itu tidak hanya mempersatukan kehidupan dalam suatu rumah tangga saja, namun ada hal lain yang harus digabungkan dalam inti-inti perjanjian. Dengan harapan lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.



3. Teruntuk kaum wanita perjanjian pernikahan begitu banyak manfaatnya. Atas berjalannnya perjanjian perkawinan, maka dapat terjaga hak-hak dan keadilan kaum wanita (istri). Supaya tidak timbul kasus suami memiliki sendiri harta gono-gini dan juga menguasai harta benda pribadi milik istrinya. Perjanjian pernikahan bisa digunakan sebagai bahan dasar seorang istri. Selain itu juga sebagai sarana dalam pemberdayaan kaum wanita, perjanjian pernikahan tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk melindungi kaum wanita dari hal-hal yang bisa menimbulkan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dari segi pemenuhan hak kepemilikan harta dan perspektif keadilan, maka perjanjian pemisahan harta masuk

dalam peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*). Karena larangan tentang memiliki harta benda yang dipunyai orang lain dengan cara yang tidak sah (halal), apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka akibatnya akan terancamnya eksistensi harta mereka. Dalam penelitian Ru‘fah Abdullah, disebutkan beberapa contoh dari kerugian pasangan suami istri yang bercerai dan merugikan satu pihak. Salah satunya adalah kasus



Dewi Hughes di tahun 2005.88

Kasus perceraian artis Dewi Hughes dengan bekas suaminya, Alfin, yang telah menjadi kabar di media masa, adalah salah satu contoh kasus yang menarik untuk dibahas. Gugatan cerai Hughes diterima oleh Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan. PA telah menetapkan tentang harta yang dibagi yaitu harta gono gini atau harta bersama yang diperoleh suami istri pada saat berlangsungnya pernikahan, terikat perjanjian pernikahan adalah 50 : 50. Dari hal yang sudah ditetapkan itu Hughes mengajukan naik banding karena menurutnya harta kekayaan yang dianggap Alfin sepenuhnya milik hughes sendiri. Selainnya itu sepanjang pernikahan Hughes

berlangsung ia menganggap sudah bekerja lebih keras.

88 Ru‘fah Abdullah, *Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum*

*Islam Dan Perundang-Undangan*, jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 3 No.

1, (2016), 45.

Sedangkan Alfin hanya berpengaruh sebagai manajer Hughes beberapa saat setelah menikah. Sesuai aturan yang berlaku manajer mempunyai hak sepuluh persen (10%) atas honor yang diperoleh klien.



Secara *de facto,* tentunya putusan ini merugikan pihak Dewi Hughes sebagai pihak yang bekerja. Namun secara regulasi dan aturan, harta yang dihasilkan suami dan istri yang berada dalam ikatan perkawinan masuk dalam harta bersama. Pun yang bekerja hanya salah satu pihak, tapi kepemilikan harta tetap milik berdua. Maka untuk mengantisipasi ketidakadilan tersebut terjadi, perlu disepakati perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan.

Contoh yang lain adalah kasus seorang TKW yang ditinggal selingkuh oleh suaminya. Tulang punggungnya adalah istri, pihak suami tidak bekerja justru selingkuh. Namun ketika pasangan tersebut bercerai, harta yang dihasilkan oleh TKW tersebut tetap menjadi milik berdua. Maka perjanjian pernikahan mempunyai unsur yang bermaksud baik dan positif, yaitu; memelihara perempuan dari sikap suami yang semaunya sendiri untuk mencukupi kebutuhannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri. Begitupula sebaliknya, jika tulang punggungnya adalah suami dan pihak istri selingkuh

maka harta yang dihasilkan suami juga tetap milik istri meskipun istri selingkuh.

**5. *Hifdz al-irdl* ( memelihara kehormatan )**

*Hifdz al-irdl* (menjaga kehormatan) adalah *haq al- intirom al-insani* ( terkait hak atas martabat manusia ). Tidak hanya sebatas usaha dalam melindungi harkat martabat diri dan keluarga atas tuduhan dan fitnah orang lain. Melestarikan adat serta budaya merupakan hal yang penting untuk memelihara kehormatan dan martabat masyarakat. Di dalam lingkup yang lebih luas, memelihara martabat dan kehormatan bangsa merupakan berhubungan dalam pembahasan tentang hak

memelihara harkat martabat manusia.89

Berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :



1. Memelihara (menjaga) keturunan dalam peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), seperti disyari'atkannya nikah dan diharamkannya berzina, jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi keturunan.

2. Memelihara (menjaga) keturunan dalam peringkat

kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), seperti ditetapkannya

89 Ridwan Jamal, 9.

ketentuan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalak padanya, jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad nikah, suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar mitsil. Sedangkan dalam kasus thalak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi.



3. menjaga (memelihara) regenerasi tentang peringkat *al- tahsiniyyah*, seperti yang dijelaskan dalam syari'at Islam khitbah atau walimah dalam pernikahan, hal ini dilaksanakan dengan tujuan menyempurnakan tujuan pernikahan, jika hal ini dilalaikan atau dihindarkan, tidak akan mempengaruhi dari eksistensi keturunan, dan tidak juga akan mempersusah orang yang melaksanakan

pernikahan.90

Memelihara generasi keturunan berkaitan erat tentang pemeliharaan keturunan manusia, maka dari itu wajib ada penekanan terkait problem kelahiran bayi. Menyangkut juga dengan masa depan anak-anak manusia. Seperti yang telah dijelaskan dalam agama Islam, anak-anak mempunyai hak untuk dilahirkan dengan metode yang terhormat, misal dalam

berkaitan tentang keturunan manusia yang mendatang, anak-

90Afrida, 28.

anak tersebut juga mempunyai hak untuk diberi pemeliharaan yang baik, dan ini hanya bisa ditentukan apabila mereka lahir dari pasangan suami istri yang sah dengan jalan pernikahan. Permasalahan pendidikan dan pengasuhan anak akan menemui permasalahan jika kedua orang tua anak bercerai.



Salah satu akibat perceraian adalah berhentinya kedua orang tua dalam melakukan kewajibannya sebagai suami-istri. Perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi peristiwa ini sudah menjadi bagian kehidupan dalam masyarakat. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu

dan anak.91

Perhatian orang tua kepada anak merupakan hal yang sangat penting. Pengembangan karakter anak merupakan upaya yang perlu melibatkan semua pihak. Peran mantan suami dan istri dalam mengesampingkan permasalahan antara keduanya

baik yang terjadi sebelum dan sesudah perceraian. Dengan

91 Delvi Olivia, dkk. *Pola Asuh Anak pada Keluarga Broken Home di Kota Sungailiat Provinsi Bangka Belitung*, Jurnal Empirika, Vol. 2 No 1 (2017),11.

berusaha melindungi, mengasuh, memperhatikan, membimbing, dan membina anaknya. Perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis. Seperti perasaan malu, sensitif, dan rendah diri hingga menarik



diri dari lingkungan.92

Hal-hal yang biasanya ditemukan pada anak ketika orang tuanya bercerai adalah rasa tidak aman, tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi, sedih dan kesepian, marah, kehilangan, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orang tua bercerai. Bagaimana anak bereaksi terhadap perceraian orang tuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih

sayang yang lebih besar untuk.93

Terjadinya perceraian membawa akibat hukum terhadap suami istri yang bercerai, terhadap anak, maupun terhadap harta kekayaan. Terhadap suami istri, adanya perceraian berakibat hapusnya segala akibat perkawinan seperti hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan. Istri mendapatkan kembali kedudukannya sebagai wanita yang tidak

kawin. Kekuasaan orang tua juga terhenti dengan adanya

92 Delvi Olivia, dkk. Pola Asuh Anak, 111.

93*Ibid.*

perceraian, karena berganti dengan perwalian. Perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa ini ditentukan oleh Pengadilan. Kebersamaan harta dalam perkawinan juga terhenti dengan adanya perceraian. Harta bersama yang ada dalam perkawinan dibagi sebagai harta gono gini antara suami dan istri.



Melihat pentingnya tanggungjawab orang tua kepada anak meskipun telah bercerai, perjanjian perkawinan yang di dalamnya mengatur tentang hak anak, masuk dalam dalam peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*). Peraturan Undang-Undangan Nomor 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak menjelaskan berupa orang tua mempunyai tugas memelihara anak serta bertanggungjawab atas anaknya. Keharusan ini dijelaskan dengan beberapa penjabaraan diantaranya mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dapat disimpulkan masing-masing orang tua pada sesuai prinsipnya memang mempunyai hak selama wewenangnya tidak dihapus atau dicabut. Akan tetapi peraturan perundang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pada awalnya sudah menutupi kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) dengan pasal 41 ayat (1). Pasal tersebut menjelaskan yang mana bila terdapat sengketa tentang

memutuskan hal tersebut. Penyelesaian sengketa hak pengasuhan anak dalam perceraian di pengadilan tentunya akan menyebabkan dampak negatif bagi perkembangan anak.



Maka perlu dirumuskan sebuah perjanjian perkawinan termasuk di dalamnya mengatur tentang hak asuh anak. Dengan tujuan menyadarkan pasangan yang telah bercerai agar beritikad baik untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga masalah yang ditimbulkan oleh perceraian, terutama masalah anak, akan dapat diminimalkan.

Dalam perjanjian tersebut bisa saja dijelaskan mengenai mekanisme pengasuhan anak dalam bercerai. Misal memutuskan dan menyepakati kewajiban ayah dalam membiayai pemeliharaan anak. Jika ternyata di belakang hari ayah tersebut tidak peduli lagi dengan kewajibannya maka diadakan pembahasan lagi terhadap metode dalam kekuasan orang tua yang mempunyai sifat tunggal, dan mempertegas hukuman bagi ayah yang telah lupa akan keharusannya mengeluarkan biaya dalam pemeliharaan anak-anaknya. Apabila ibu yang telah diberi tugas dalam hak pemeliharaan anak kebetulan lupa akan hal tersebut maka akan mendapat

perwalian.



**BAB IV**

106

**IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN PEMISAHAN HARTA HARTA SUAMI ISTRI DALAM PUTUSAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.**



**69/PUU-XIII/2015**

**A. Deskirpsi Implikasi Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Harta Suami Istri Dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, memperluas makna perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan dari pemohon atas nama Ike Farida, sorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Persoalan yang dialami pemohon berkaitan dengan *judicial review* UU Perkawinan terhadap Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945). Subtansi pasal yang hendak diuji adalah menyangkut hak-hak warga

negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing dan

101

tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.94

Wanita Indonesia yang akan menjalin hubungan pernikahan dengan lelaki negara asing, wajib membuat akta perjanjian pernikahan. Harapan dari memisahkan harta benda kekayaan ini agar mempelai wanita tidak hilang akan haknya untuk memiliki rumah dan tidak hilang atas hak waris rumahnya. Hal ini disebabkan atas peraturan yang berada di dalam UU pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, harta kekayaan yang didapat selama berlangsungnya pernikahan menjadi harta bersama. apabila memiliki rumah ba‘da menjalin pernikahan dengan status hak milik, maka rumah tersebut merupakan rumah yang dimiliki dari kedua belah pihak. Padahal, orang asing tidak dapat memiliki property dan hanya bisa menggunakan dengan status hak pakai dan hak sewa. Maka dari itu, perlu terbentuknya perikatan pernikahan sebagai alat pemisah antara harta kedua mempelai. Masalah-masalah yang



bisa terjadi pada saat wanita Indonesia yang akan menjalin

94 Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi, dkk, *Pengaturan*

*Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

*69/Puuxiii/2015*, 3.

perkawinan dengan laki-laki asing tersebut tidak membentuk perjanjian perkawinan dan pernikahan telah berlangsung.95

Sehabis diPutus oleh MK No. 69/PUU-XIII/2015 pasal 29 UU No. 1 Th. 1974 menjadi:



1. Ketika saat itu, sebelum dilaksanakannya atau ketika berlangsungnya ikatan pernikahan anatara belah pihak atas kesepakatan bersama bisa meminta perjanjian yang tertulis yang akan dilegalkan oleh petugas yang bertugas mencatat perkawinan atau notaris, yang mana setelah itu isinya akan berlaku juga terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga terkait dalam perjanjian tersebut.

2. Perjanjian tidak dapat berlaku apabila tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, agama dan kesusilaan.

3. Berlakunya perjanjian diawali sejak berlangsungnya pernikahan, kecuali hal tersebut disebutkan dalam ketentuan lain di isi Perjanjian Perkawinan.

4. Selama berlangsungnya pernikahan, perjanjian pernikahan dapat berupa harta benda selama pernikahan berlangsung atau perikatan lainnya, tidak bisa diganti atau dihapus,

kecuali mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak,

95 Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, 4.

dan penggantian atau penghapusan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Implikasi lain yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tampak pada wewenang lembaga- lembaga terkait dalam pengurusan legalisasi akta perjanjian perkawinan. Jika sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, akta perjanjian perkawinan dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi pasangan suami istri nonmuslim, dan oleh Kantor Urusan Agama bagi pasangan suami istri yang beragama muslim. Sedangkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dilakukan di hadapan notaris, akta perjanjian juga dikeluarkan oleh notaris. Sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama melakukan legalisasi terhadap akta tersebut. Akta Perjanjian Perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak baik pihak suami, istri, maupun pihak ketiga setelah dilakukan legalisasi.



Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan bagan berikut:96

96 Agus Purnomo, dan Lutfiana Dwi M. *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin*, laporan hasil penelitian kerjasama Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan Mahkamah Konstitusi 2018. Dapat diakses melalui <https://mkri.id/index.php?page=web.Penelitian&menu=8&pages=1>

Sebelum Perkawinan dimulai

Menyepakati poin-poin yang akan dijadikan sebagai dasar perjanjian perkawinan kedua belah pihak

Dilakukan dihadapan Dispenduk bagi non- muslim, dan KUA bagi yang muslim

Dispenduk dan KUA mengeluarkan akta perjanjian perkawinan dan melegalisasi

Surat perjanjian perkawinan mengikat berlaku untuk pihak suami istri dan pihak lain yang bersangkutan

Gambar 3.1 Alur pembuatan surat perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015



Sebelum perkawinan dimulai ataupun selama dalam ikatan perkawinan

Menghadap ke notaris untuk menyepakati perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pihak suami dan istri. Notaris melakukan pengecekan terhadap isi perjanjian, kemudian mengeluarkan akta perjanjian perkawinan

akta dari notaris diajukan ke dispenduk bagi pasangan yang telah mengikat perkawinan non muslim, dan ke KUA untuk suami istri beragama Islam

Dispenduk maupun KUA melakukan pengecekan terhadap substansi perjanjian. JIka isi perjanjian tidak melanggar norma dan aturan yang ada, dikeluarkanlah form legalisasi perjanjian perkawinan

akta perjanjian dinyatakan legal, dan mengikat kedua belah pihak dan juga pihak ketiga sekaligus.

Gambar 4.2 Alur pembuatan surat perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015

Dalam bagan di atas tampak jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi besar pada perubahan sistem regulasi hukum perdata di Indonesia. Mengingat bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, dan mengikat, maka ketentuan ataupun peraturan tentang hal serupa yaitu perjanjian perkawinan, baik yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata, maupun UU No 1 Tahun tidak berlaku. Suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum di mana sebelumnya hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan dimulai, saat ini bisa dilakukan baik sebelum perkawinan maupun selama dalam ikatan perkawinan. Perubahan kedua tampak dari perubahan wewenang beberapa lembaga terkait. Di mana sebelumnya menjadi ranah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non muslim, dan Kantor Urusan Agama bagi muslim berubah menjadi wewenang notaris.



Sedangkan wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama adalah melegalisasi akta yang dikeluarkan oleh notaris. Perubahan ketiga tampak pada waktu perjanjian dimulai, dari sebelumnya dimulai semenjak perkawinan dilakukan, berubah menjadi semenjak perjanjian dilakukan. Sedangkan berlaku surut atau tidaknya perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam ikatan

perkawinan ditentukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dianalisis oleh pihak notaris adakah kemungkinan merugikan pihak ketiga maupun kedua belah pihak. Yang selanjutnya setelah disepakati oleh kedua belah pihak, notaris mengeluarkan akta perjanjian perkawinan.



**B. Analisis Maqasid Al Syari’ah Terhadap Implikasi Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Harta Suami Istri Dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No.**

**69/PUU-XIII/2015**

**1. Analisis melindungi Agama**

Dalam lingkup melindungi agama, agama telah memberikan tiga fase atau tingkatan, yaitu: (a) kebutuhan pokok (primer/*dharuriyat*), (b) kebutuhan sekunder/*hajiyat*, dan (c) kebutuhan tersier/*kamaliyat*, yang mana ketiga tingkat tersebut mempunyai arti sebagai sesuatu penyempurnaan dan membuat hidup menjadi nyaman. Yang pasti harus mendahulukan yang pertama daripada yang kedua, dan demi mendapatkan yang pertama dan yang kedua maka dapat meninggalkan yang ketiga. Dalam arti lain, mensegerakan *kemashlahatan* yang jelas atau besar, yang umum atau yang langgeng, adalah kewajiban memilih sesuatu yang harus

disegerakan daripada kemashlahatan yang tidak pasti, yang kecil dan perorangan, dan yang sementara.

Sesuai yang berhubungan dengan *kemudharatan,* agama juga memberikan beberapa pilihan, misal menyegerakan usaha mengindari hal yang dilarang yang bersifat primer atas yang sekunder. seperti menjahui ancaman terkait jiwa atas ancaman yang berhubungan dengan harta. Maka dari itu, kelas tingkat *kemudharatan* yang berbeda-beda sesuai bentuk dan juga dampaknya. Dengan ini munculah jenis-jenis sebagai berikut: ―*kemudharatan* harus dicegah, namun kemudharatan yang lebih ringan dan karena itu pula dapat dibenarkan melakukan sesuatu yang mengandung *kemudharatan* yang ringan atau terbatas demi mencegah *kemudharatan* yang besar bersifat umum.‖



Dalam *fikih siyasiyah* dinyatakan bahwa kebijakan imam dan semua orang yang diberi kuasa untuk mengatur urusan orang-orang Islam, menjadi kewajiban mereka menciptakan kesejahteraan umum (*al-maslahah alaammah*), jika ia tidak mampu menciptakannya maka kepemimpinannya

dianggap tidak sah secara syara‘ dan tidak bisa di tolerir.97

Maka putusan Mahkamah Konstitusi no. 69/PUU- XIII/2015 adalah salah satu upaya untuk mendatangkan

97Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Borneo,*al-Wajiez fi idhah Qawaid alFiqh al-Kulliyyah* (Beirut:Muassasah al-Risalah, 1996),

347.

kesejahteraan umum. Yaitu kesejahteraan dalam hubungan rumah tangga yang bebas dari kekhawatiran akan kerugian salah satu pasangan suami istri secara finansial. Dan kemungkinan kerugian WNA yang menikah dengan WNI karena tidak bisa memiliki aset di Indonesia. Perubahan yang terjadi dalam tubuh lembaga eksekutorial memang terlihat sangat signifikan. Tentunya perubahan ini bukanlah hal yang mudah bagi tiap lembaga eksekutorial. Baik Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Notaris harus bersinergi untuk menjalankan amanah sebagai pencatat perjanjian perkawinan. Rasa inferioritas dan superioritas tiap lembaga harus dikesampingkan.



Semua lembaga eksekutorial dalam putusan Mahkamah Konstitusi no. 69/PUU-XIII/2015 harus merujuk pada kaidah *thasharruf al-Imam manuthun bi al-Maslahah.98* Lebih jauh dari sekedar pengetian retorik tersebut, maka ada pengertian yang lebih luas bahwa segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan

tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah.

Musyawarah dalam penentuan perubahan peran lembaga

98Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybaah wa al-Nadha‟ir* (Semarang: Maktabah Thaha Putera, t. t.), 83.

negara ini sudah diambil pemerintah melalui proses

persidangan di Mahkamah Konstitusi.

**2. Analisis melindungi Jiwa**



Arti kata *nafs* seperti yang dimaksud merupakan pengertian dari bahasa Arab yang digunakan oleh al-Qur‘an. Sesuai bahasa dalam kamus al-Munjid, *nafs* (*jama‟nufus* dan *anfus*) yang mempunyai arti ruh (roh) dan *„ain* (diri sendiri). Sedang di kamus al-Munawir telah dijelaskan bahwa kata *nafs* (jamaknya *anfus* dan *nufus*) mempunyai arti roh dan jiwa, juga bermakna *al-jasad* (badan, tubuh), *al-sahsh* (orang), *al-sahsh alinsan* (diri orang), *al-dzat* atau *al‟ain* (diri sendiri). Sedangkan sesuai pendapat Dawan Raharjo di Ensiklopedia al- Qur‘an dijelaskan bahwa dalam al-Qur‘an *nafs* yang *jama‟*nya *anfus* dan *nufus* mempunyai makna jiwa (*soul*), pribadi (*person*), diri (*self* atau *selves*), hidup (*life*), hati (*heart*), atau pikiran (*mind*), selain itu juga digunakan sebagai beberapa arti lainnya. Dalam kitab *Lisan al-Arab*, Ibnu Manzur mengungkapkan bahwa kata *nafs* di bahasa Arab dipakai dalam dua makna yakni *nafs* dalam maknanya nyawa, dan *nafs* yang

menyimpan makna keseluruhan dari hal-hal dan hakikatnya mengarah kepada diri pribadi.99

Perjanjian perkawinan mengandung resiko yang bersumber bukan dari Allah, tetapi dari yang berinteraksi dengan-Nya. Resikonya adalah kemungkinan munculnya penyelundupan hukum dalam perjanjian pemisahan harta. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi pada diperbolehkannya membagi harta bersama menjadi harta yang terpisah saat kedua suami istri berada dalam ikatan perkawinan. Hal ini tentunya membuka peluang bagi para lembaga eksekutorial untuk memberi keuntungan bagi satu pihak dan merugikan satu pihak lainnya. Seperti kemungkinan dibuatnya perjanjian pemisahan harta yang berlaku surut yang berdampak pada kerugian pihak ketiga.

Implikasi lain adalah, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi no. 69/PUU-XIII/2015, notaris adalah satu-satunya lembaga yang diamanahi untuk membuat akta perjanjian perkawinan tanpa memiliki hak eksekutorial. Sehingga akta perjanjian dibuat berdasarkan pengakuan dari para pihak saja.



Semua manusia dapat berdosa atau salah untuk itu, hati dan

99 Diakses melalui [http://repositori.uin-](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1732/1/Syahrin%20Rusman.pdf) [alauddin.ac.id/1732/1/Syahrin%20Rusman.pdf, p](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1732/1/Syahrin%20Rusman.pdf)ada 27 Januari 2021.

pikiran perlu dikelola (*manage*) agar tidak terjerumus dalam dosa dan kesalahan.



Meskipun begitu manusia merupakan makhluk lemah. Manusia ketika dalam kenyataannya sering lengah sehingga ia terperosok ke dalam kesalahan, dosa, atau lupa, atau mereka lupa berterimakasih atas karunia kenikmatan dari Allah. Maka dari itu, Allah selalu menegur manusia dengan dalil-dalil ancamannya, agar tidak melupakan tupoksi dan kewajiban kita baik sebagai individu, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai makhluk-Nya. Bahkan jangan berbesar hati dengan besarnya kewenangan yang dimiliki dan menyucikan diri. Ketika dalam pembuatan akta perjanjian, maka perlu sangat diwaspadai; waspada terhadap diri sendiri, lembaga hukum, dan pihak- pihak yang dapat merugikannya. Setan merupakan salah satu pihak yang harus diwaspadai dalam membuat akta perjanjian. Setan mempunyai keinginan yang sebesar mungkin untuk merugikan manusia, dan apabila setan tidak dapat meraihnya, maka setan hanya tidak dapat mendapatkan tujuannya, dan apabila ini tidak berhasil, maka setan selalu bertekad bagaimana manusia tidak mendapatkan keuntungan yang halal. Dalam melakukan amanah konstitusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, seyogianya setiap lembaga yang terkait melindungi dalam keutuhan jiwa

seseorang dan jujur dalam pembuatan akta perjanjian supaya tidak memanipulasi data dan tidak merugikan pihak yang berkicampung dalam perjanjian tersebut.



**3. Analisis memelihara pikiran**

Pikiran adalah sumber pengetahuan, penerang hidayah, cahaya matahari, serta sarana manusia dalam memperoleh kebahagian di dunia dan akhirat. Menggunakan pikiran dapat memahami perintah-perintah dari Allah, dengan adanya akal manusia menjadi khalifah dimuka bumi, dan dengan akal manusia menjadi sempurna, mulia, serta berbeda dengan makhluk lainnya.

Melalui akal dapat menemukan kemaslahatan dalam bidang pernikahan dengan cara ijtihad. Seperti, manusia berfikir bahwa harta bersama seringkali menyebabkan pertikaian dan perdebatan antar suami istri ketika bercerai. Akal manusia ini yang dapat juga membuka cakrawala kehidupan, mereka bisa menjangkau ke seluruh penjuru bumi dan menyelam ke dasar laut, serta berjalan di udara.

Menggunakan pikirannya manusia, umat manusia memperoleh hidayah menuju ma‘rifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Menggunkan pikirannya, mereka dapat menyembah dan menaati-Nya, menjalankan kesempurnaan dan

keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari hal-hal dari yang kurang dan cacat, meyakinkan bahwa para rasul dan para nabi itu benar ada, dan meyakini bahwa para nabi dan rasul adalah sebagai perantara yang akan membawa manusia kepada sesuatu yang telah diperintahkan Allah kepada mereka, menyampaikan kabar-kabar gembira dengan janji, dan memperingatkan manusia dengan ancaman-ancamannya.



Dengan itu manusia dalam menjalankan pikiran mereka, untuk belajar hal-hal yang halal dan yang haram, serta yang dapat mengancam eksistensinya dan hal-hal yang dapat bermanfaat, dan hal-hal yang baik dan buruk. Ketika manusia menjalankan pikiran dan akalnya, dengan menjalankan hati nurani dan perhatiannya, maka rasa aman akan didapatkannya, merasa kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat sekitar akan dipengaruhi oleh rasa kenyamanan, cinta, dan ketenangan. Mereka akan merasakan keamanan atas harta kekayaannya, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka.

Desakan/fithrah merawat diri sendiri, sedangkan desakan keinginan berhubungan intim berhubungan dengan uasaha manusia dalam menjaga habitatnya. demikianlah beberapa fithrah yang telah diberikan Allah terhadap umat manusia. Hanya untuk manusia, Allah memberikan nafsu atau keinginan serta akal pikiran, supaya sebagai sarana dalam

menggapai keinginannya, di samping itu Allah memberinya arahan dengan apa yang sudah ditentukan dalam agama supaya dapat menjaga sikap mereka dari terjebaknya untuk mengikuti hawa nafsu syaitan. menyediakan untuk manusia dua sarana dalam memperoleh kemanfaatan.



Pertama, dalam penyediaan materi yang dimiliki, dan kedua, mengupayakan tenaga serta pikiran. Hal yang dimaksudkan yaitu memiliki hal-hal yang bisa berkembang secara sendiri, seperti pohon yang masih hidup dan hewan yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan tenaga dan pikiran merupakan suatu usaha yang dapat memperoleh materi yang dapat dimiliki atau usaha yang dapat digunakan dalam pemenuhan keinginan. Hal ini terdapat dalam sistem suatu perjanjian atau kesepakatan. Beginilah kurang lebih yang

dipaparkan oleh al-Mawardi (w. 1058 M).100

Dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dilakukan di tengah perkawinan sedang berlangsung, dibutuhkan kesungguhan dan kesabaran dari setiap lembaga eksekutorial. Dibutuhkan ketelitian, kecermatan, dan juga ketepatan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak

merugikan pihak tertentu.

100 M.Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan*

*Allah*, 1-3.

Sumber hikmah (pengetahuan) diperoleh melalui akal dan pikiran manusia selain itu akal juga sebagai sinar hidayah, cahaya hati nurani, dan sarana manusia dalam memperoleh nikmat di dunia dan akhirat. Melalui fikiran, ketentuan perintah dari Allah swt diberikan, melalui akal manusia dapat menjadi khalifah dimuka bumi ini, dan akal juga yang telah menjadikan manusia sempurna, mulia, dan beda dengan mahkluk-makhluk



lainya.

Tenaga dan pikiran dikerahkan untuik memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan benar-benar bertujuan untuk kemaslahatan. Fitrah manusia sebagai makhluk berakal harus benar-benar merepresentasikan manusia sebagai makhluk yang mulia. Karena pada saat umat manusia menggunakan pola pikirannya dan akalnya, melalui hati nurani serta perhatiannya, maka ia akan mendapatkan jiwa yang terasa nyaman dan aman, menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan ketenangan, serta orang-orang yang berada disekitarnya pun akan merasakan rasa sayang, cinta, dan ketenangan. Umat manusia pun memperoleh kenyamanan serta keamanan atas harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka.

Analisis *kemafsadatan* terhadap implikasi perjanjian perkawinan pemisahan harta harta suami istri dalam putusan



putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

**4. Analisis Menjaga Harta**

Harta sebagai salah satu ujian bagi manusia, Allah memberikan karunia-Nya berupa harta, tidak hanya sebagai anugerah namun juga sebagai *bala'* (ujian). Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah hamba-Nya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah.

Ujian itu bisa juga dalam bentuk banyaknya harta, sehingga banyak di antara manusia yang memiliki banyak harta justru semakin menjauhkan dirinya dan jalan Allah. Sebaliknya jika sang pemilik harta bersabar dan dapat menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya maka kebahagiaanlah yang akan ia dapat.harta pada dasarnya bagai pisau belati bermata dua, ia bisa bermanfaat bila digunakan di jalan kebaikan dan bisamenjadi adzab bila pemiliknya membelanjakannya bertentangan dengan syariat-Nya.

Harta kekayaan dapat dimiliki melalui cara antara lain menggunakan usaha (*a‟mal*) atau mata pencaharian (*ma‟isyah*) yang sesuai dengan ketentuan syara‘(halal). Beberapa dasar

dari ayat Al-Qur‘an dan hadits Nabi telah memotivasi umat manusia untuk berusaha mendapatkan rizki dengan cara yang halal. Apabila berpengaruh akan melupakan kematian, serta dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuan- Nya) melalaikan shalat dan zakat, serta menentukan kekayaan untuk sekelompok orang yang kaya saja maka mereka dilarang



untuk mendapatkan harta, berusaha, atau bekerja.101 Kemudian

larangan mengumpulkan harta kekayaan dengan jalan yang haram misal dengan cara yang menimbulkan riba, mengundi nasib, tukar menukar benda haram atau dilarang, mengambil milik orang lain tanpa izin, merampas, tidak adil dalam menimbang pada timbangan, mencari harta dengan jalan kebathilan serta merugikan, dan melalui suap-menyuap.

Umat manusia terpengaruh oleh pekerjaan untuk mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan melindungi eksistensinya serta dengan tujuan mendapatkan kenikmatan materi dan religi, mereka dilarang menjadi penghalang antara dirinya dengan harta yang mereka cari. Akan tetapi, hal-hal yang dapat mempengaruhi keinginan ini dibatasi dengan syarat

tiga diantaranya, yaitu cara memperoleh harta harus dengan

101 Amin Qodri, *Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal*

*Penelitian Universitas Jambi*, Volume 16, Nomor 1, Hal. 11-18 ISSN:0852-

8349 (2014).

cara yang dihalalkan syara‘, harta diperuntukan kepada hal-hal yang dihalalkan syara‘ dan harta yang diperoleh di keluarkan sebagian untuk hak-hak a



Allah (zakat).

Mengingat pentingnya kepemilikan harta dalam kehidupan manusia di dunia, maka tetap menjaga hak manusia atas kepemilikan harta adalah sebuah keharusan. Jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tak dapat memiliki harta. Oleh karena itu, adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi pada perlindungan kepemilikan harta bagi pasangan suami istri yang telah menikah. Bagi WNA dan WNI yang melangsungkan perkawinan tanpa didahului perjanjian perkawinan sebelum perkawinan, diperbolehkan membuat perjanjian pemisahan harta di tengah ikatan perkawinan. Sehingga WNA tersebut tidak kehilangan hak untuk memiliki aset di Indonesia

Dan bagi TKI atau TKW yang menjalani *long distance marriage* juga dapat membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta meskipun pembuatannya di buat saat TKI dan TKW tersebut sudah dalam ikatan perkawinan. Sehingga pihak yang sedang bekerja keluar negeri maupun yang sedang menunggu di kampung tidak merasa was-was tatkala salah satu

mereka.

Jika benda tersebut kepunyaan Allah swt, semantara kekuasaan terhadap benda tersebut sudah diserahkan kepada manusia, melewati hal-hal sesuai izinnya, maka seseorang tersebut memperoleh hak atas harta tersebut sesuai dengan tujuan perlakuannya mereka untuk memperoleh keuntungan dari harta tersebut serta mengembangkan harta, yang mana harta tersebut menjadi hak miliknya.



Sebab ketika orang memiliki harta, maka esensinya, dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkannya. Sehingga dalam hal ini dia terikat dengan hukum-hukum syara‘ dan bukan bebas mengelola secara mutlak. Begitu pula dia tidak bebas mengelola zat barang tersebut secara mutlak, meskipun ia mempunyai bendanya. Alasannya adalah bahwa ketika mereka mengurusi dengan tujuan memperoleh manfaat dari benda tersebut melalui cara yang tidak sesuai dengan syara‘, seperti halnya dengan menghabis-habiskannya tahu memakainya untuk sebuah hal yang maksiat, maka negara wajib melarangnya atau menghukumnya, negara juga dapat mencabut haknya untuk mencabut izin yang telah diberikan kepadanya. Negara, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.

untuk melindungi warga negaranya.



127

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU- XIII/2015 masuk dalam kebutuhan peringkat *al- tahsiniyyah*.

Jika perjanjian perkawinan tersebut tidak dilaksanakan karena tidak mungkin, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, dan jika dilakukan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Sebaliknya, justru mempermudah seseorang saat perceraian terpaksa harus terjadi.



Dalam perspektif *hifdz an-nafs* ( menjaga jiwa ) masuk dalam kategori peringkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*). Jika perjanjian pemisahan harta tidak dilakukan oleh pasangan suami istri, maka eksistensi manusia tidak akan terganggu. Namun jika tidak dilakukan, maka akan mempersulit suami istri ketika berpisah atau bercerai

121

Pemeliharaan akal (*al-aql*) dalam regulasi perjanjian perkawinan diaktualisasikan melalui penyediaan regulasi dan aturan, tahapan pembuatan perjanjian perkawinan, lembaga yang memiliki kuasa untuk membuat perjanjian perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan fungsi, efektivitas dan kreativitas pikiran dan juga mencegah hal-hal yang merusak dan menghalangi fungsi dari perjanjian perkawinan.



Dari segi pemenuhan hak kepemilikan harta dan perspektif keadilan, maka perjanjian pemisahan harta masuk dalam peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*). Karena larangan untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah (halal), jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi harta.

Pentingnya tanggungjawab orang tua kepada anak meskipun telah bercerai, perjanjian perkawinan yang di dalamnya mengatur tentang hak anak, masuk dalam dalam peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*).

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015adalah salah satu upaya untuk mendatangkan kesejahteraan umum. Yaitu kesejahteraan dalam hubungan rumah tangga yang bebas dari kekhawatiran akan kerugian salah satu pasangan suami istri secara finansial.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi pada perlindungan kepemilikan harta bagi pasangan suami istri yang telah menikah. Negara, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan hak pada lembaga eksekutorial untuk melindungi warga negaranya.



**B. Saran**

1. Penelitian ini adalah penelitian normative dan melakukan kajian berdasarkan literature. Tentunya, penelitian ini tidak melihat langsung bagaimana fakta di lapangan. Baik bagi lembaga eksekutorial maupun bagi pasangan yang telah membuat ataupun yang akan membuat perjanjian perkawinan. Maka penelitian ini akan lebih komprehensif jika disertai dengan penelitian lapangan.

2. Lembaga-lembaga yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 seperti KUA dan Dispenduk hendaknya menghimbau setiap calon pengantin untuk membuat perjanjian perkawinan. Hal ini tentunya perlu untuk dilakukan mengingat banyaknya kasus yang terjadi ketika pasangan suami istri bercerai. Utamanya

adalah kasus yang berkaitan dengan harta gono gini. Namun penting juga untuk ditekankan bahwa dengan perjanjian perkawinan bukan berarti pasangan suami istri tersebut memiliki niat untuk bercerai.



**DAFTAR PUSTAKA**

Haedah Fradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September (2008)



R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni, 1987

R.Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa,

1994

Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jabar, 1990

Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan keluarga, Surabaya: Airlangga University Press

Sukardi Jurnal Katulistiwa, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Journal of Islamic Studies, Volume 6 Nomor 1 (2016),9

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Bandung: Citra Aditya Bakti,

2000.

Muchsin, Perjanjian Perkawinan Dalam Persfektif Hukum

Nasional, Jakarta:Varia Peradilan, 2008

Gunadi, Perjanjian Perkawinan Menurutkitab Undang-Undang Hukum Perdatadan Undang-Undang nomor 1Tahun1974, Journal for Islamic Studies,, Vol.1, (2018), 01.

Haedah Fradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 (2008), 03

Dyah Ochtorina Susanti, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami lstri (Perspektif Maqashid Syari,ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, No.2, April2018,1-30, ISSN



2596-6176 (online)

Eva Dwinopianti, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, Jurnal Lex Renaissance No. 1 VOL. 2 (2017), 16 – 34.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindu Persada, 2001

Khoirudin Nasution, Pengantar Studi Islam, Yogyakarta: Raja

Grafindo Persada, 2009

Abbudin Nata. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2002

Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Jakarta: Kencan, 2010, 155.

Ali Mutakin, Teori Maqâshid Al Syarî‘ah Dan Hubungannya

Dengan Metode Istinbath Hukum, Vol 19 (2017), 03.

Lihat Ghafar Shidiq, ―Teori Maqâshid Al-Syarî‘ah Dalam

Hukum Islam‖, dalam Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No.

118 (2009), 120

La Jamaa, ―Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâshid

Al-Syarî‘ah‖ dalam Jurnal Ilmu Syarî‘ah dan Hukum Vol.

45 No. II, (2011), 1255-1256

Ali Mutakin, Teori Maqâshid Al Syarî‘ah Dan Hubungannya

Dengan Metode Istinbath Hukum, Vol 19 ( 2017), 03.

Ali Mutakin, Teori Maqâshid Al Syarî‘ah Dan Hubungannya

Dengan Metode Istinbath Hukum, Vol 19 (2017), 03

Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, Al-Mustashfa min ‗Ilm Al-Ushul, Juz I, Beirut, Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 1983



Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, KONSEP MAQASHID Al-SYARIAH DALAM MENENTUKAN HUKUM ISLAM (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), Jurnal Al-Iqtishadiyyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, ISSN Elektronik:, Volume: I., ISSUE I. (2014), 2442-2282.

Jasser Auda, Fiqh al- Maqāṣid, h. 15-17; Jasser Auda, Maqasid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law a Sistem Approach, Herndon: IIIT, 2008, 5-17

Jasser Auda . Maqasid Syariah . Dalil al-Mubtadi‘in London:

al-Ma‘had al-Alami li al-Fikri alIslami, 2008, 7, 32 dan 49

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermessa

Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta

Bersama, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum

Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta

Bersama, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012

Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta

Bersama, Bandung: Mandar Maju, 2007

Lutfiana Mayasari, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Tesis, IAIN Ponorogo

N.G Yudara, Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Majalah Renvoi No. 10.34.III, (2006),



74.

Zulfiqar Mokodompit, Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam, dalam jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 6 (2015),

170.

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta, logos

Wacana Ilmu, 1997